



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2018-2023

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenannya Rencana Strategis dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023. Rencana Strategis ini merupakan pedoman Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2018-2023. Renstra Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir berisi dua tujuan utama yaitu apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya dalam periode lima tahun ke depan dengan penekanan pada Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam upaya turut serta meningkatkan pembangunan kesehatan yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi, maka perlu ditingkatkan semangat kemitraan dalam memberikan pelayanan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran aktif masyarakat untuk memiliki hidup yang sehat.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak pihak telah membantu dalam penyusunan Renstra melalui proses top-down dan bottom-up serta yang telah tulus membimbing dalam penyempurnaan penyusunan Renstra ini. Harapan kami semoga renstra ini bisa menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, 04 April 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



dr. H. FRIZAL D,MM  
NIP. 19730402 200501 1005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	
1.1. Latarbelakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN</b> .....	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir .....	10
2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.....	45
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir .....	48
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir. ....	53
<b>BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN</b> .....	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri hilir .....	54
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..	56
3.3. Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Propinsi .....	58
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	60
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	60
<b>BAB. IV. TUJUAN dan SASARAN</b> .....	
4.1. Tujuan.....	62
4.2. Sasaran.....	62
<b>BAB. V. STRATEGI dan ARAHAN KEBIJAKAN</b> .....	
5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir .....	64
<b>BAB. VI. RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....	70
<b>BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	133
<b>BAB. VIII. PENUTUP</b> .....	134

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

#### 1.1.1. Pengertian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir

Pada tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018- 2023, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2018-2023, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka kemudian dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2).

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Permendagri 86 Tahun 2017 , dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir adalah karena terjadi perubahan mendasar yaitu terjadinya bencana non alam pada tahun 2020 yaitu pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar di seluruh sektor pembangunan nasional dan daerah, termasuk juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir serta perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang secara mendasar merubah substansi RPJMD. Berikut beberapa peraturan perundangan yang menyebabkan substansi Perda tentang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023, dirubah:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebabkan perubahan struktur belanja;
3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mengamankan indikator makro daerah, meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan;

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah nomenklatur dan kode; dan
6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Selain hal tersebut di atas, perubahan Renstra Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir juga menyesuaikan nomenklatur terikini sesuai Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2). Adanya beberapa perubahan dari pemerintah pusat seperti PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi

#### 1.1.2. Proses Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dan keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi :

- a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

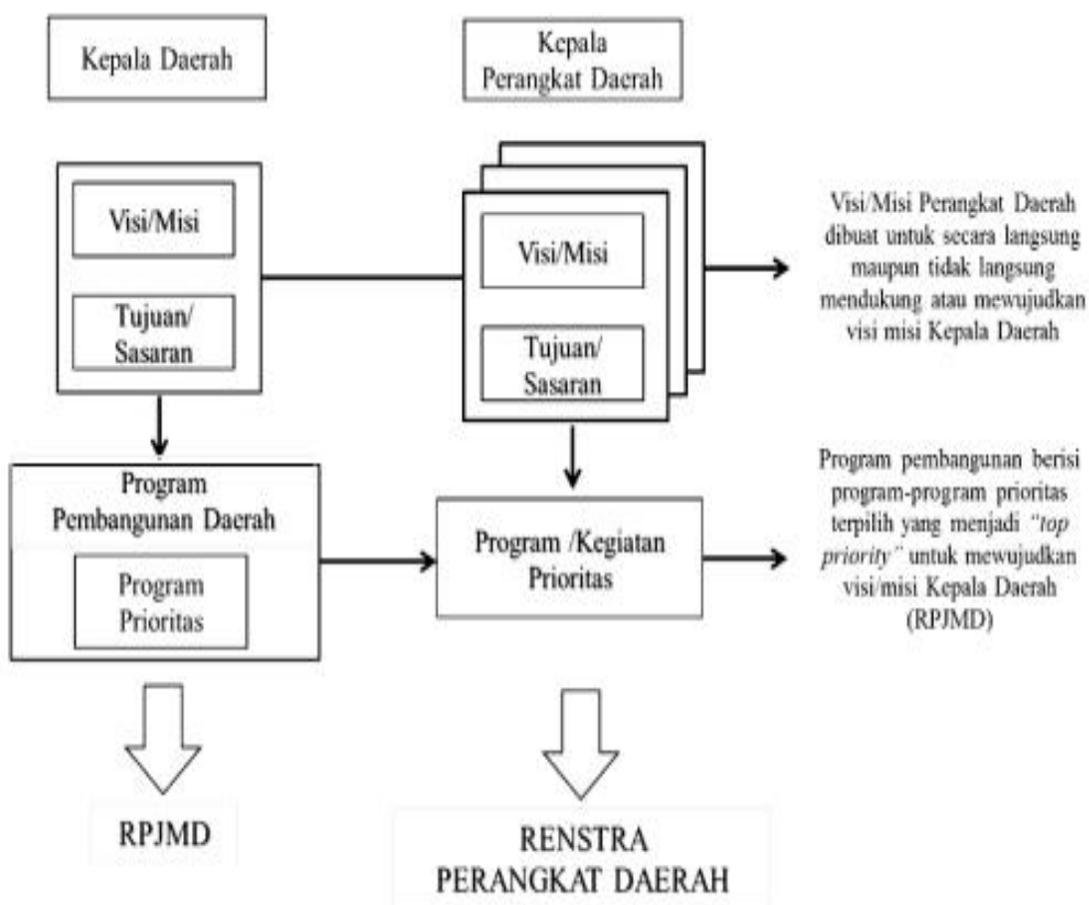


2017 selanjutnya setiap Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 sebagai dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program selama 5 tahun.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan di Kabupaten Indragiri hilir yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2018-2023. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir ini dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 seperti pada Gambar 1.2

Gambar 1.2

Keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 ini tetap mengacu pada UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Oleh karenanya lima pendekatan perencanaan yang dipergunakan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, (4) pendekatan atasbawah (top-down), dan (5) pendekatan bawah-atas (bottom-up). Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Visi Kabupaten Indragiri Hilir 2018 - 2023, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Indragiri Hilir.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2)
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2).

16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
20. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Riau;
21. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir
22. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Serta Tata Kelola Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi guna mendukung penyusunan perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud Penyusunan RENSTRA Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1. Menjabarkan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Indragiri Hilir ke dalam program dan kegiatan;
2. Sebagai acuan / pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan sehingga lebih terarah;
3. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), agar terjamin sinergisitas, sinkronisasi dan Integrasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;
4. Memudahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir beserta jaringannya, seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, DPRD, Swasta dan Masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
5. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan kesehatan;

6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan kegiatan;
8. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
9. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan kesehatan; dan
10. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

1.3.2. Tujuan Penyusunan RENSTRA Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1. Menyesuaikan dengan Perubahan Kebijakan Nasional
2. Menelaah kinerja Dinas Kesehatan Indragiri Hilir lima tahun terakhir berdasarkan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas/Badan Kurun waktu 5 tahun, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan atau indikator lainnya.
3. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan kabupaten/kota sesuai tupoksi Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir .
4. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
5. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas/Badan . . . Kabupaten Indragiri Hilir secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
6. Menjadi pedoman penyelarasan dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;
7. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kesehatan dalam jangka waktu 5 tahun;
8. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Kesehatan; dan
9. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	<b>Pendahuluan</b>
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	<b>Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir</b>
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
	2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
BAB III	<b>Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis
BAB IV	<b>Tujuan dan Sasaran</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
BAB V	<b>Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir</b>
BAB VI	<b>Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan</b>
BAB VII	<b>Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir</b>
BAB VIII	<b>Penutup</b>

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir**

2.1.1. Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Kesehatan Masyarakat serta memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang Kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan Kesehatan, dan bidang pengembangan sumber daya Kesehatan, dimana dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan (*PERBUP INHIL Nomor.47 Tahun 2021*)

2.1.2. Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol;
- g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja badan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

1) Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- d. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- e. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas-tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- h. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- j. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k. Mengumpul dan mengelola data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran OPD;
- l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran (RKA/RKA KL), penyusunan dan pembahasan revisi DPA/DIPA OPD;
- n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Fisik dan Keuangan OPD;
- o. Mempersiapkan bahan-bahan dan mengikuti musrenbang RKPD Kecamatan;
- p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan sekaligus menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas fungsional;
- q. Melaksanakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- r. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup urusan umum dan kepegawaian. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- d. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- g. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- h. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- j. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- k. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja lingkup urusan umum dan kepegawaian;
- l. Melaksanakan ketatalaksanaan, keprotokolan, kehumasan, pengelolaan surat-menyurat, penataan kearsipan, dan penyelenggaraan rumah tangga;
- m. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, KGB, LP2P, cuti, sasaran kerja pegawai, penilaian prestasi kerja ASN, daftar urutan kepangkatan, model C, karis/karsu, usulan pensiun, usulan kebutuhan PNS, usulan CPNS ke PNS, pemindahan, pemberhentian, mutasi, formasi pegawai, pendidikan dan latihan, ujian dinas, pembinaan karier ASN, dan surat-surat umum dan kepegawaian lainnya;

- n. Melaksanakan pengelolaan absensi dan pelaporan kehadiran pegawai.
- o. Melaksanakan analisa kebutuhan, perekaman dan validasi data kepegawaian;
- p. Menindak lanjuti surat-surat berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;
- q. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- r. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup urusan keuangan dan perlengkapan. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- d. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- e. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- f. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- g. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- h. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;

- j. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- k. Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan;
- l. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja lingkup urusan keuangan dan perlengkapan;
- m. Melaksanakan pembuatan administrasi SPJ, SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU serta menyiapkan SPM;
- n. Melaksanakan pembuatan usulan dan pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNS;
- o. Melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan pengendalian keuangan.
- p. Melaksanakan penerapan sistem informasi data keuangan, barang dan aset;
- q. Melaksanakan pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan kas keuangan;
- r. Menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pendistribusian ATK, peralatan kantor, jasa, barang cetakan dll untuk kebutuhan;
- s. Mengadministrasikan penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan peralatan kantor, barang dan aset termasuk Inventarisir barang yang baik dan yang rusak serta barang yang akan dihapus di lingkungan;
- t. Memeriksa, menganalisa dan memverifikasi seluruh dokumen perencanaan anggaran, pengeluaran anggaran maupun revisi anggaran termasuk dana lunturn yang dikelola;
- u. Menindak lanjuti surat-surat berkaitan dengan urusan keuangan dan perlengkapan;
- v. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan;
- w. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
- x. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## 2. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pelayanan Kesehatan lingkup Kefarmasian dan Alkes, Pengembangan Sarana dan Prasarana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan lingkup Kefarmasian dan Alkes, Pengembangan Sarana dan Prasarana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Sumber Daya Kesehatan lingkup Kefarmasian dan Alkes, Pengembangan Sarana dan Prasarana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan lingkup Kefarmasian dan Alkes, Pengembangan Sarana dan Prasarana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan lingkup Kefarmasian dan Alkes, Pengembangan Sarana dan Prasarana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan lingkup Kefarmasian dan Alkes, Pengembangan Sarana dan Prasarana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan lingkup Kefarmasian dan Alkes, Pengembangan Sarana dan Prasarana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan lingkup Kefarmasian dan Alkes, Pengembangan Sarana dan Prasarana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

1) Subkoordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kepala Seksi Kefarmasian dan Alkes mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan kefarmasian dan alkes.

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Kefarmasian dan Alkes sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
- d. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian dan Alkes;
- e. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Kefarmasian dan Alkes;
- f. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Kefarmasian dan Alkes;
- g. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Kefarmasian dan Alkes;
- h. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Kefarmasian dan Alkes;
- i. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Kefarmasian dan Alkes;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Kefarmasian dan Alkes;
- k. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Kefarmasian dan Alkes;
- l. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Kefarmasian dan Alkes berdasarkan pada renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- m. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Kosmetika, dan pengamanan Pangan dalam rangka upaya kesehatan;

- n. Penyiapan penyusunan standar, prosedur dan kriteria di bidang Obat dan BMHP, Kosmetika, dan pengamanan Pangan dalam rangka upaya kesehatan;
- o. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Obat dan BMHP, Kosmetika, dan pengamanan Pangan dalam rangka upaya kesehatan;
- p. Menghimpun dan menganalisa data dan informasi berkaitan dengan urusan Kefarmasian dan Alkes lingkup kabupaten;
- q. Merencanakan dan penilaian ketersediaan Obat dan BMHP lingkup Kabupaten;
- r. Melaksanakan pengadaan Obat dan BMHP dalam lingkup kabupaten;
- s. Melaksanakan Pengendalian Obat dan BMHP;
- t. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Obat dan BMHP, Kosmetika dan pengamanan Pangan dalam rangka upaya kesehatan. Dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, dan produk Obat dan BMHP, Kosmetika dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).
- u. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup Program Kefarmasian dan Alkes; dan
- v. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas –tugas Seksi Kefarmasian dan Alkes;
- w. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Kefarmasian dan Alkes; dan
- x. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## 2) Subkoordinator Pengembangan Sarana dan Prasarana

Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan pengembangan sarana dan prasarana. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;

- d. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- e. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- f. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- g. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- h. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- i. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- k. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- l. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana berdasarkan pada renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- m. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- n. Penyiapan penyusunan standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- o. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- p. Menghimpun dan menganalisa data dan informasi berkaitan dengan urusan Pengembangan Sarana dan Prasarana di tingkat kabupaten
- q. Mengkoordinasikan sekaligus melaksanakan urusan Pengembangan Sarana dan Prasarana yang meliputi :
- r. Menyusun perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan;
- s. Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana di tingkat Kabupaten;
- t. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana;

- u. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup Program Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- v. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas –tugas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- w. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan
- x. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
- e. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- f. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- h. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- i. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- j. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- l. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- m. Melakukan pemetaan, perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan, Registrasi Tenaga Kesehatan, serta Pembinaan terhadap kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
- n. Melaksanakan Penyusunan Sistem Data & Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- o. Melaksanakan Penyusunan tentang Perencanaan, Pengembangan, dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai peraturan yang berlaku, meliputi Perencanaan Kebutuhan, Pemerataan/ Pendistribusian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- p. Melaksanakan Penyusunan Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK). (terkait tentang kegiatan tenaga kesehatan);
- q. Melakukan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- r. Melaksanakan Program Pendidikan Berkelanjutan dalam rangka Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan Kebutuhan program di Kabupaten Indragiri Hilir, tugas Belajar dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis- Berbasis Kompetensi (PPDS-PPDGS-BK);
- s. Melaksanakan kegiatan Program Internship Dokter Indonesia (PIDI)
- t. Melaksanakan Pendayagunaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah Khusus (Nusantara Sehat);
- u. Melaksanakan Advokasi dan Koordinasi dengan Lintas Program serta UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pengembangan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat (UPT. PKK, Pengembangan SDM Kes dan KOM) dalam rangka menyusun dan melaksanakan pelatihan teknis kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir;

- v. Menyelenggarakan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Kabupaten Indragiri Hilir.
- w. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- x. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas –tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- y. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan lingkup Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- z. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Kesehatan Masyarakat lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan Masyarakat lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Kesehatan Masyarakat lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan Masyarakat lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan Masyarakat lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Kesehatan Masyarakat lingkup

Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;

- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Kesehatan Masyarakat lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
- g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Kesehatan Masyarakat lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

1) Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
- d. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- e. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- f. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- h. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- i. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;

- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- k. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- l. Melaksanakan peningkatan kemampuan manajemen, pengelolaan program, surveilans, perbaikan Kesehatan Keluarga dan Gizi masyarakat bagi pengelola program melalui advokasi, pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi;
- m. melakukan evaluasi standart pelayanan Kesehatan Ibu kesehatan anak dan kesehatan Lansia (Kesehatan Maternal dan Neonatal, kesehatan Balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja serta kesehatan Lansia), serta peningkatan status gizi masyarakat, perbaikan kualitas asupan pangan dan gizi masyarakat, berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- n. Melaksanakan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi dalam peningkatan kemampuan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat berkoordinasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor yang berhubungan;
- o. melaksanakan program kesehatan keluarga (kesehatan lansia, kesehatan usia subur dan KB, Perlindungan Kes.Reproduksi, Kes Bumil, Kes maternal, kes neonatal dan pencegahan komplikasi, Kes.Bulin dan nifas, Kes.bayi, kes,anak balita dan anak pra sekolah, Anak Usia Sekolah, Kesehatan Anak Remaja, Kesehatan anak khususnya);
- p. Melaksanakan standar program perbaikan Gizi masyarakat dan penanggulangan masalah gizi (penanggulangan GAKY, penanggulangan KVA, Anemia, Gizi buruk, Gizi lebih, serta pemberian suplemen Gizi, Vit A, Fe, Mineral mix, PMT), gizi lebih dan masalah gizi lainnya;
- q. Melaksanakan surveilans Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), gizi dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) secara berkala
- r. Melaksanakan Pengelolaan dan evaluasi Posyandu, UPGK (Upaya Perbaikan Gizi Keluarga) dan PMT AS (Pemberian Makanan Tambahan Secukupnya);
- s. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat berdasarkan capaian kegiatan sebagai bahan pelaporan dan penyempurnaan kegiatan selanjutnya;

- t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi kepada kepala bidang kesehatan masyarakat secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- u. Melaksanakan pembinaan gizi mikro (suplemen gizi, Vitamin A, Fe dan mineral mix);
- v. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi masyarakat;
- w. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas–tugas Seksi urusan Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- x. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat lingkup urusan Program Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
- y. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2) Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
- d. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- i. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- k. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- l. Melaksanakan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Program Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kewaspadaan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan (Kejadian Luar Biasa) KLB dan Bencana Alam;
- m. Melaksanakan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor pada seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- n. Melaksanakan fasilitasi strategi promkes untuk pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif sehat;
- o. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan SDM di bidang Promkes dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan;
- p. Melaksanakan Pembinaan Program Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) termasuk penilaian kinerja Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
- q. Melaksanakan Pembinaan program kesehatan dan promosi kesehatan di Rumah Sakit (PKMRS);
- r. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Promosi Kesehatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan kepada Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban;
- t. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- u. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas –tugas Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- v. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- 3) Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
  - b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan;
  - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
  - d. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
  - e. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
  - f. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
  - g. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
  - h. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
  - i. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
  - j. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
  - k. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
  - l. Melaksanakan program kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja meliputi; Penyehatan air dan Sanitasi Dasar (Tanah, Udara, dan Radiasi), Pengembangan Kawasan dan Pemukiman Sehat, Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan, Pengawasan Tempat Tempat Umum (TTU), Pengawasan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan program Kesehatan Kerja;
  - m. Melaksanakan kebijakan terkait dengan Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan olahraga;

- n. Melaksanakan survailans Kesehatan Lingkungan;
- o. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan kesehatan olahraga ;
- p. Melakukan analisis resiko Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja berdasarkan hasil pemantauan dan Pengujian Laboratorium serta rekomendasi (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) AMDAL;
- q. Melakukan Monitoring, Bimbingan Teknis dan Supervisi pelaksanaan Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan kesehatan olahraga;
- r. Melakukan koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor untuk kemajuan program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan kesehatan olahraga;
- s. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan kesehatan olahraga berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan;
- t. Melakukan pengelolaan dan pengembangan system informasi kesehatan lingkungan untuk mendukung pelaksanaan program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan kesehatan olahraga;
- u. Menyusun Pelaporan dan melaksanakan pemutakhiran data program kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan kesehatan olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- v. Melaporkan hasil pelaksanaan program dan anggaran seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban;
- w. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup Seksi Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- x. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas –tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- y. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
- z. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit lingkup Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. Untuk melaksanakan tugas dimaksud), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit lingkup Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit lingkup Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit lingkup Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit lingkup Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit lingkup Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit lingkup Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit lingkup Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

1) Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi

Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan surveilans dan imunisasi. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Surveilans dan Imunisasi sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
- d. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- e. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- f. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- g. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- h. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- i. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- k. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- l. Melaksanakan program Surveilans Terpadu Penyakit (STP), Surveilans Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), Imunisasi dan Sistem Kewaspadaan Dini Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)/bencana serta Peningkatan Kesehatan Haji dan Matra;
- m. Melakukan koordinasi Lintas program dan Lintas Sektor program Surveilans Terpadu Penyakit (STP), Surveilans Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), Imunisasi dan Sistem Kewaspadaan Dini Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)/bencana serta Peningkatan Kesehatan Haji dan Matra;

- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan program Surveilans Terpadu Penyakit (STP), Surveilans Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), Imunisasi dan Sistem Kewaspadaan Dini Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)/bencana serta Peningkatan Kesehatan Haji dan Matra;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program Surveilans Terpadu Penyakit (STP), Surveilans Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), Imunisasi dan Sistem Kewaspadaan Dini Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)/bencana serta Peningkatan Kesehatan Haji dan Matra;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksie Surveilans dan Imunisasi kepada kepala bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban;
- q. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup Program Surveilans dan Imunisasi; dan
- r. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas –tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- s. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2) Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
- d. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- e. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

- f. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular;
- g. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- h. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- i. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- k. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- l. Melaksanakan Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML);
- m. Melaksanakan Program Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (PPTVZ);
- n. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) Puskesmas;
- o. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap Program Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (PPTVZ) Puskesmas;
- p. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnannya;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular kepada Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban;
- r. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- s. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- t. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3) Subkoordinator Pengembangan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Subkoordinator Pengembangan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
- d. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- e. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- f. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan;
- g. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- h. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- i. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

- k. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- l. Melaksanakan program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh darah, Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Penyakit Kanker, Penyakit Kronis dan Degeneratif, Gangguan Indra dan Fungsional serta Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
- m. Melaksanakan kerja sama/kemitraan program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh darah, Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Penyakit Kanker, Penyakit Kronis dan Degeneratif, Gangguan Indra dan Fungsional serta Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh darah, Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Penyakit Kanker, Penyakit Kronis dan Degeneratif, Gangguan Indra dan Fungsional serta Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
- o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Penyakit Kanker, Penyakit Kronis dan Degeneratif, Gangguan Indra dan Fungsional serta Kesehatan Jiwa dan NAPZA di tingkat kabupaten;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksie Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa kepada kepala bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban;
- q. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- r. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas–tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- s. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pelayanan Kesehatan lingkup Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan lingkup Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pelayanan Kesehatan lingkup Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan lingkup Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan lingkup Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pelayanan Kesehatan lingkup Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pelayanan Kesehatan lingkup Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pelayanan Kesehatan lingkup Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

1) Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan pelayanan kesehatan primer dan tradisional. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- j. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- k. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi untuk penguatan pelayanan kesehatan primer dan pengobatan tradisional;
- l. Melaksanakan pembinaan dan upaya peningkatan pengelolaan manajemen di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP);
- m. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED);

- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas (UKP, UKM, Perkesmas, Laboratorium);
- o. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di FKTP;
- p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitas Pelayanan kesehatan yang ada di FKTP;
- q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Kesehatan tradisional di FKTP;
- r. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan pada klinik;
- s. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pelayanan kesehatan pada praktik perorangan;
- t. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap quick wins program pelayanan darah;
- u. Melakukan evaluasi, analisa dan pengembangan terhadap kemampuan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
- v. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- w. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup Program Pelayanan Kesehatan Primer;
- x. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas –tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- y. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; dan
- z. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## 2) Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN

Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan pelayanan kesehatan rujukan dan JKN. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN;
- d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN;
- e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN;
- f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN;
- g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN;
- h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN;
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN;
- j. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN;
- k. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit swasta;
- l. Melaksanakan/memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit pemerintah dan swasta;
- m. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit pemerintah dan swasta;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sarana, prasarana dan peralatan pada fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN dan dibidang perizinan, mutu dan akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN;

- o. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarana, prasarana dan peralatan pada fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN dan dibidang perizinan, mutu dan akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN;
- p. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang sarana, prasarana dan peralatan pada fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN dan dibidang perizinan, mutu dan akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN;
- q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan program rumah sakit daerah dan swasta tingkat Kabupaten;
- r. Bertanggung jawab dalam penyusunan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Jamkesda;
- s. Menyusun RENSTRA dan RENJA Program Pembiayaan Kesehatan;
- t. Melakukan koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program terkait Pembiayaan Kesehatan dan kepesertaanya;
- u. Melakukan pendataan, merumuskan, serta mapping kepesertaan Program Jamkesda dan JKN/KIS;
- v. Melaksanakan pengendalian dan merumuskan serta mengevaluasi pencatatan dan pelaporan terkait pelaksanaan pelayanan peserta Jamkesda dan JKN/KIS;
- w. Melaksanakan perhitungan Pembiayaan untuk program kesehatan dan permasalahan kesehatan program di tingkat daerah, provinsi, maupun lintas daerah kab/kota.
- x. Menyusun rencana program dan laporan kegiatan sesuai bidang tugas Seksi Rujukan dan JKN;
- y. Melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pembiayaan kesehatan;
- z. Melaksanakan verifikasi dan pengendalian pembiayaan kesehatan masyarakat dan menganalisis aspek kendali;
- aa. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup Program Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- bb. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas –tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN;
- cc. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN; dan

dd. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3) Subkoordinator Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Subkoordinator Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
- d. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- e. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- f. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- g. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- h. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- i. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- k. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- l. Pengkajian pengembangan Registrasi dan Akreditasi;
- m. Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup program Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- n. Melaksanakan proses pemberian rekomendasi perizinan dan peningkatan mutu pelayanan melalui sertifikasi dan pendaftaran

- kepada tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan;
- o. Pemberian sertifikasi pangan industri rumah tangga, penyehatan jasa boga dan rumah makan;
  - p. Pembinaan dan pengawasan Registrasi dan Akreditasi;
  - q. Penyusunan laporan dan evaluasi Registrasi dan Akreditasi;
  - r. Penyusunan standar SPM, petunjuk teknis dan prosedur program akuntabilitas dan regulasi kesehatan;
  - s. Proses pelayanan perizinan, sertifikasi dan pendaftaran pada tenaga kesehatan, sarana kesehatan, sarana pelayanan kesehatan penunjang milik pemerintah dan swasta;
  - t. Melaksanakan kegiatan Registrasi bagi Tenaga Kesehatan dan mengoreksi Surat Tugas Penyelenggaraan Praktek Kedokteran.
  - u. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pelayanan kesehatan pada praktik perorangan;
  - v. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi dan sertifikasi pada tenaga kesehatan sarana kesehatan, sarana pelayanan kesehatan penunjang milik pemerintah dan swasta;
  - w. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup Program Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan; dan
  - x. Menindak lanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas –tugas Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
  - y. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan; dan
  - z. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan terdiri dari:

### 1) UPT Puskesmas

Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pembangunan kesehatan, pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Puskesmas memiliki fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan UPTD;

- b. pelaksanaan pembinaan terhadap jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya;
- d. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan pertama di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan kegiatan sistem informasi Puskesmas;
- f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari:

1. Puskesmas Kempas jaya
2. Puskesmas Sungai Salak
3. Puskesmas Tembilahan Hulu
4. Puskesmas Tembilahan Kota
5. Puskesmas Gajah Mada
6. Puskesmas Sungai Piring
7. Puskesmas Teluk Pinang
8. Puskesmas Sapat
9. Puskesmas Kuala Lahang
10. Puskesmas Concong Luar
11. Puskesmas Tanah Merah
12. Puskesmas Kuala Enok
13. Puskesmas Kota Baru
14. Puskesmas Pengalihan Keritang
15. Puskesmas Enok
16. Puskesmas Pengalihan Enok
17. Puskesmas Pulau Kijang
18. Puskesmas Benteng
19. Puskesmas Selensen
20. Puskesmas Mandah
21. Puskesmas Batang Tumu
22. Puskesmas Pelangiran
23. Puskesmas Sungai Guntung
24. Puskesmas Pulau Burung
25. Puskesmas Teluk Belengkong
26. Puskesmas Bekawan

27. Puskesmas Iliran
28. Puskesmas Simpang Gaung
29. Puskesmas Sungai Raya
30. Puskesmas Keritang Hulu

2) UPT Gudang Farmasi

Kepala UPT Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perencanaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengendalian dan pengawasan pengelolaan obat.

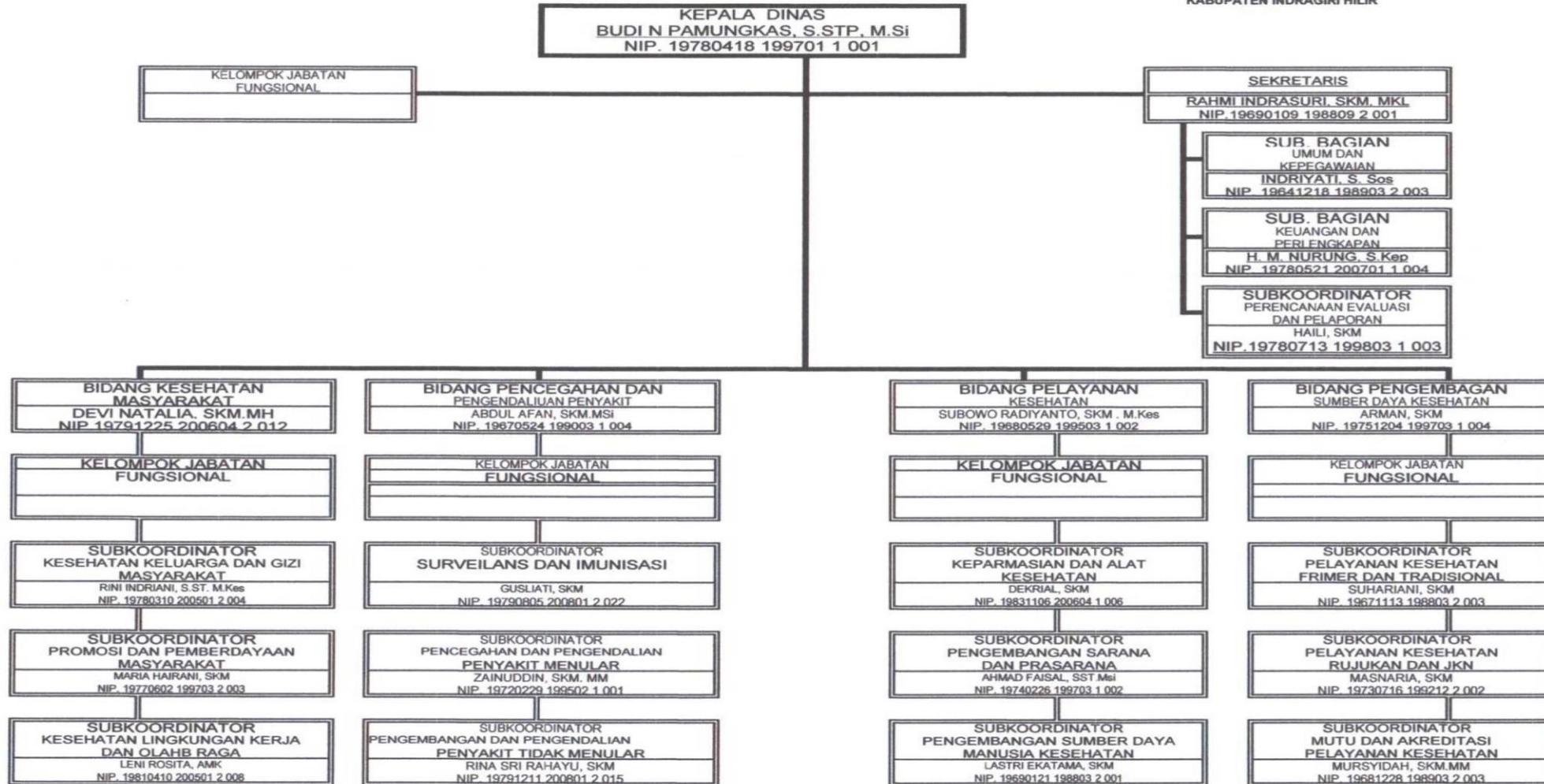
3) UPT Laboratorium Kesehatan

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan dan pelayanan kesehatan.

**Gambar 2.1 Skema Struktur Organisasi OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR. 45 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS  
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



## 2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir

### 2.2.1. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas, Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) sampai dengan April 2021 berjumlah 2886 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir s/d Desember 2021

Tabel 2.1 SDM di Dinkes Indragiri Hilir berdasarkan Unit Kerja Tahun 2021

NO	UNIT	JENIS KELAMIN		JUMLAH ASN
		L	P	
1	2	3	4	5
1	KEPALA DINAS		1	1
2	SEKRETARIAT	13	14	27
3	BIDANG KESMAS	3	10	13
4	BIDANG P2P	6	12	18
5	BIDANG SDK	5	5	10
6	BIDANG PELKES	2	7	9
JUMLAH		29	49	78

Tabel 2.2 SDM di Dinkes Indragiri Hilir berdasarkan Golongan Tahun 2021

NO	UNIT	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Gol. IV	4	4	8
2	Gol. III	19	44	63
3	Gol. II	6		6
4	Gol. I	1		1
JUMLAH		30	48	78

Tabel 2.3 SDM di Dinkes Indragiri Hilir berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH ASN
		L	P	
1	2	3	4	5
1	SD	1		1
2	SLTP	0		0
3	SLTA	5		5
4	D 1			0
5	D III	3	9	12
6	D IV		2	2
7	S 1	15	26	41
8	S 2	7	10	17
9	S 3			0
JUMLAH		31	47	78

Sumber Daya Manusia (SDM) di UPT Dinkes Kabupaten Indragiri Hilir s/d Des 2021

Tabel 2.4 SDM di UPTD Dinkes Kabupaten Indragiri hilir Berdasar Golongan

No	UPT	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Puskesmas	34	521	233		788
2	Gudang Farmasi	1	2	2		5
3	Labkesda		6	1		7
Jumlah		35	529	236		800

Tabel 2.5 SDM di UPTD Dinkes Kabupaten Indragiri hilir berdasar Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah(Orang)					
		Puskesmas		GFK		Labkesda	
		PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS
1	S3						
2	S2	10	1	1			
3	S1	204	241	2		3	4
4	D3	450	624		1	4	3
5	D4	85	65				
5	D1	3					
6	SMA	35	105	2	6		2
7	SMP	1					
8	SD						
Jumlah		788	1036	5	7	7	9

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang terdaftar dalam aset tetap Dinas Kesehatan

Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Desember 2021 tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.6 Daftar Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir s/d Desember 2021

<b>N0</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Nilai Rupiah</b>
1	Tanah	130	Persil	14.504.899.048
2	Peralatan dan Mesin	21.425	Unit	136.974.010.216
3	Gedung dan Bangunan	469	Unit	122.444.880.972
4	Jaringan dan Instalasi	116	Unit	10.214.232.253
5	Aset Tetap Lainnya	3	Unit	200.855.592
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp.284.338.878.082</b>

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir**

Pembangunan Kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir dalam 5 tahun (2018-2023) ini telah memberikan kontribusi yang cukup bermakna dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir meskipun hasil yang telah dicapai tersebut ada beberapa yang masih belum memenuhi target serta memerlukan upaya keras dan berkesinambungan untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan. Realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7****Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan****Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 – 2020**

No	SPM	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	100	100	71	77	80	77,68	80,17	71	77	80	77,68	80,1739
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	100	100	68	76	80	48,79	76,33	68	76	80	48,79	76,3334
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100	100	100	100	79	72	71	79,62	85,49	79	72	71	79,62	85,4946
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	100	100	100	100	48	55	58	58,6	79,86	48	55	58	58,6	79,8599
5	Pelayanan Kesehatan Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	93	81	88	97	80,32	93	81	88	97	80,32
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100	100	100	100	100	100	100	91	10,45	45,80	100	100	91	10,45	45,8
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100	100	100	100	100	100	100	90	59,25	60,78	100	100	90	59,25	60,78
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	100	100	100	100	30	35	6	14,4	40,15	30	35	6	14,4	40,15
9	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	100	100	100	100	100	10	12	59	88,1	0,41	10	12	59	88,1	0,4116
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ	100	100	100	100	100	100	100	73	79	89,22	100	100	73	79	89,2237
11	Pelayanan Kesehatan Terduga TB	100	100	100	100	100	100	100	100	30,1	6,70	100	100	100	30,1	6,6956
12	Pelayanan Kesehatan Orang Resiko Terinfeksi HIV	100	100	100	100	100	45	38	22	14	42,00	45	38	22	14	42

Berdasarkan Tabel 2.7 diatas dapat dijelaskan bahwa Sebagian besar indikator SPM bidang kesehatan yang telah diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai besar tidak mencapai target yang telah ditentukan sebesar 100% (seratus persen), walaupun pada tahun 2016,2017 dan 2018 ada beberapa SPM capaian targetnya sebesar 100% akan tetapi ada beberapa SPM yang belum mencapai target, Adapun indicator SPM yang mencapai target yaitu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan ODGJ dan Pelayanan Kesehatan Terduga TB. Pada pencapaian target kinerja SPM kesehatan dari tahun ke tahun masih belum memenuhi target yang telah ditentukan atau belum tercapai karena anggaran yang terbatas sehingga pengalokasian biaya untuk penyelenggaraan SPM juga terbatas. Akan tetapi diharapkan masalah keterbatasan anggaran tidak menjadi masalah utama dalam penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM Kesehatan.

**Tabel. 2.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 – 2020**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk )	80	90				47	28				58,75	31,11			
2	Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	750	850				318	309				42,4	36,35			
3	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	8	15				4	12				50	80			
4	Jumlah puskesmas pembantu disetiap desa/kelurahan	236	199				175	197				74,15	98,99			
5	Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani	79	82				100	100				126,58	121,95			
6	Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	92	95				68,41	76,11				74,35	80,11			
7	Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani	82	83				100	100				121,95	120,48			
8	Persentase kunjungan bayi	92	95				64,05	64,09				69,61	67,4632			
9	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100				100	100				100	100			
10	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	77	88				25	32,63				32,46	37,07			
11	Persentase penderita TBC yang ditemukan dan diobati	100	100				100	100				100	100			
12	Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh	100	100				100	100				100	100			
13	Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan	100	100				100	100				100	100			
14	Persentase kelurahan/desa mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	100	100				100	100				100	100			
15	Persentase desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	170	170				95	130				55,88	76,47			

16	Rasio Posyandu per satuan balita	811	854				592	592				72,99	69,32			
17	Persentase desa/kelurahan siaga aktif	80	85				50	236				62,5	277,64			
18	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	75	75				73,7	100				98,26	133,33			
19	Nilai AKIP Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan			60	60	64			60	64,43	64,43			100	107,38	100,67
20	Angka Harapan Hidup			67,21	67,09	68			67,21	67,66	67,85			100	100,84	99,77
21	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup			230	230	230			49,02	49,05	71,4			21,31	21,32	31,04
22	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup			20,6	20,6	20,6				16,82	76,8			0	81,65	372,81
23	Prevalensi Balita Gizi Buruk			5	5	5				0,02	0,03			0	0,4	0,6
24	Persentase puskesmas yang terakreditasi			100	75	86			70	94	75			70	125,33	87,20
25	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan			70	75	80				75	78,34			0	100	97,92
26	Indeks keluarga sehat			0,5	0,5	0,6			0,3	0,3	0,5			60	60	83,33

**Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016-2020**

No	Uraian	Anggaran pada tahun (Rp.)					Realisasi anggaran pada tahun (Rp.)					Rasio antara realisasi dan anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	<b>Belanja</b>	<b>222.384</b>	<b>230.505</b>	<b>227.277</b>	<b>249.161</b>	<b>355.811</b>	<b>179.272</b>	<b>187.633</b>	<b>200.440</b>	<b>227.814</b>	<b>292.467</b>	80,6	81,4	88,2	91,4	82,2	13,7	13,4
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>50.797</b>	<b>53.879</b>	<b>59.605</b>	<b>72.169</b>	<b>177.905</b>	<b>50.147</b>	<b>52.762</b>	<b>57.825</b>	<b>64.083</b>	<b>131.903</b>	98,7	97,9	97,0	88,8	74,1	46,1	32,9
	Belanja Pegawai	50.797	53.879	59.605	72.169	177.905,46	50.147	52.762	57.825	64.083	131.903	98,7	97,9	97,0	88,8	74,1	46,1	32,9
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>171.587</b>	<b>176.626</b>	<b>167.672</b>	<b>176.992</b>	<b>177.905</b>	<b>129.126</b>	<b>134.871</b>	<b>142.615</b>	<b>163.732</b>	<b>160.564</b>	75,3	76,4	85,1	92,5	90,3	1,0	5,8

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.**

Pelayanan Dinas Kesehatan pada periode 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan memiliki peluang sebagai berikut :

- a. Adanya otonomi daerah yg memberikan kewenangan yg lebih luas dalam pengembangan system pelayanan kesehatan (Penanganan Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19).
- b. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
- c. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, propinsi, daerah dalam upaya mendukung program-program bidang kesehatan
- d. Berkembangnya teknologi informasi & komputerisasi untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.
- e. Semakin banyaknya UKBM sebagai bentuk peran serta masyarakat

Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengembangan pelayanannya pada periode 2018-2023 menghadapi tantangan, antara lain :

- a. Adanya Re - Emerging disease dan New - emerging disease dan daerah endemis penyakit yang terus berkembang (2020 Pandemi Covid-19)
- b. Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja
- c. SDM yang belum optimal, baik secara kualitas maupun kuantitas dan khususnya menghadapi Puskesmas BLUD
- d. Gaya Hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, antara lain : sakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, diabetes, dan lainnya yang kesemuanya disebabkan oleh 3 faktor resiko utama, yaitu : merokok, kurang aktifitas fisik dan kurangnya makan makanan berserat.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri hilir**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri hilir, dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir. Faktor faktor tersebut adalah:

##### **A. Internal**

##### **1. Kekuatan**

Berbagai kelebihan yang bersifat khas yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri hilir, yang apabila dapat dimanfaatkan akan berperan besar dalam memperlancar berbagai kegiatan yang akan di laksanakan sesuai program yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi.

- a. Perencanaan program kesehatan sudah optimal
- b. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan program
- c. Monitoring dan evaluasi program berjalan baik.
- d. Komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan
- e. Kebijakan penatalaksanaan untuk percepatan dan/atau perbaikan layanan kesehatan
- f. Anggaran untuk pelayanan kesehatan
- g. Sarana prasarana operasional kesehatan yang memadai Kelemahan

Berbagai kekurangan yang bersifat khas yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri hilir, yang apabila berhasil diatasi akan berperan besar dalam memperlancar berbagai pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- a. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia belum mencukupi
- b. Kelayakan gedung Dinas Kesehatan belum memadai
- c. Pengalokasian anggaran kesehatan belum optimal
- d. Penataan bangunan di beberapa puskesmas belum sesuai standar
- e. Kerjasama lintas program belum optimal

## B. Eksternal

### 1. Ancaman

Kendala yang bersifat negatif yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri hilir, yang apabila berhasil diatasi akan besar peranannya dalam mencapai tujuan organisasi.

- a. Penyakit akibat mobilitas penduduk
- b. Kondisi geografis, bencana, berpotensi masalah kesehatan.
- c. Kondisi sosial, ekonomi dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan hidup bersih dan sehat dan perilaku yang berpotensi menimbulkan bencana
- d. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahan-bahan makanan yang sehat
- e. Pengurangan Anggaran pada tahun berjalan
- f. Adanya produk-produk yang beredar yang belum bersertifikat dan sesuai standar kesehatan
- g. Adanya Perubahan Trend Penyakit. (Pandemi Covid-19)
- h. Pemerataan Fasilitas Kesehatan masih belum sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk.

### 2. Peluang

Peluang yang bersifat positif yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri hilir, yang apabila dapat dimanfaatkan akan besar peranannya dalam mencapai tujuan.

- a. Adanya ketersediaan dana APBD yang cukup besar
- b. Dana APBN mendukung program kesehatan
- c. Dukungan masyarakat dalam implementasi program kesehatan
- d. Perkembangan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan
- e. Dukungan OPD lain.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah  
Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia belum mencukupi	Persebaran SDM Kesehatan yang belum merata	Rendahnya minat SDM Kesehatan dalam bekerja pada faskes primer di desa
		Belum optimalnya diklat yang diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM	Ketersediaan anggaran yang masih kurang memadai.
2	Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang belum optimal	Sarana Prasarana Kesehatan belum memenuhi standar	Belum terpenuhi secara baik aspek - aspek standarisasi sarana prasarana kesehatan dalam rangka menunjang peningkatan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi jangka panjang daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025, yaitu:

**“INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG 2025”**

Berdasarkan hasil penelaahan Visi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 tersebut maka Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang hendak diwujudkan Kepala Daerah dalam pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 adalah:

**“ UNTUK KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU,  
BERMARWAH DAN BERMARTABAT ”**

Dan yang menjadi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah sebagai berikut :

Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum.

Misi 2: Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.

Misi 3: Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.

Misi 4: Memantapkan Pembangunan SDM Yang Semakin Berkualitas Dan Berdaya Saing, Serta Meningkatkan Iman Dan Taqwa.

Misi 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Misi 6 : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.

Misi 7 : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, salah satunya Misi yang berhubungan dengan masalah kesehatan adalah :

Misi Ke-4: *Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing.*

Terkait misi keempat tersebut, yang menjadi tujuan Kepala Daerah adalah mewujudkan kualitas SDM berdaya saing dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar.
2. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat.

Sasaran dari segi kesehatan adalah *meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat.*

Dalam rangka mewujudkan meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat tersebut OPD Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dibidang kesehatan dengan cara :

1. Meningkatkan upaya promotif dan preventif
2. Meningkatkan mutu, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
3. Pemenuhan kuantitas dan pemerataan SDM Kesehatan
4. Mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

### **3.3 Telaah terhadap Renstra K/L**

#### **3.3.1. Renstra Kementerian Kesehatan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai OPD Teknis bidang kesehatan. Kebijakan Kementerian Kesehatan berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di provinsi . Demikian pula kebijakan provinsi juga berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di kabupaten/kota. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan tahun 2015 – 2019, Kementrian Kesehatan menetapkan dua tujuan Kementrian Kesehatan yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diuraikan dalam Program Indonesia Sehat yang melingkupi :

1. Paradigma Sehat
  - a. Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan
  - b. Promotif preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan
  - c. Pemberdayaan masyarakat
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan
  - a. Peningkatan akses terutama pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
  - b. Optimalisasi system rujukan
  - c. Peningkatan mutu
  - d. Penerapan pendekatan Continuum of Care
  - e. Intervensi berbasis risiko kesehatan
3. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional
  - a. System pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong
  - b. Kendali mutu dan kendali biaya
  - c. Sasaran : Penerima Bantuan IUR (PBI) dan Non PBI
  - d. Tanda kepesertaan : kartu Indonesia Sehat (KIS)

#### **3.3.2. Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Riau**

Tujuan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang akan dicapai adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian melalui peningkatan akses, cakupan dan mutu pelayanan kesehatan serta penyediaan sumber daya kesehatan yang cukup, merata dan bermutu. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam periode 2019-2024 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
6. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan.

Untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan maka strategi yang dilakukan akan mendukung semua capaian program dan oleh karena itu diperlukan dukungan kebijakan dari Dinas Kesehatan untuk mencapai strategis tersebut yaitu “Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif di dukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam misi kesatu yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya” adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat”.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka dirumuskan sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan kesatu terutama yang berkaitan dengan bidang kesehatan yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat” dengan indikator sasaran :

- 1) Persentase penurunan kematian ibu
- 2) Persentase penurunan kematian bayi
- 3) Persentase penurunan kematian balita
- 4) Persentase stunting
- 5) Persentase ODHA yang diobati
- 6) Persentase Pencegahan dan Pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit tidak menular
- 7) Persentase Pencapaian Universal Health Coverage
- 8) Succes Rate TB Paru
- 9) Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak krisis kesehatan akibat dan /atau berpotensi bencana

Menguraikan faktor pendukung dan penghambat baik dari pemerintah maupun kebijakan lokal dalam menjalankan tupoksi. Dari telaah terhadap Renstra Kementerian dan Propinsi

ada beberapa faktor pendukung yang dijadikan pendoman terhadap pelaksanaan Renstra Kabupaten, yaitu :

1. Adanya kebijakan kementerian kesehatan yang ditetapkan melalui Kepmenkes tentang Kabupaten Indragiri Hilir termasuk dalam katagori daerah DTPK;
2. Adanya penetapan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan program/kegiatan didaerah atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
3. Adanya indikator yang ditetapkan sebagai suatu acuan atau target yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kinerjanya.
4. Adanya program prioritas yang secara bersama antara kementerian kesehatan dan dinas kesehatan kabupaten/kota secara bersama untuk dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan kesehatan.
5. Adanya limpahan wewenang yang diberikan dari kementerian kesehatan kepada Dinas Kesehatan kabupaten / kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dari faktor pendukung sebagaimana telah dijelaskan, tentu ada hal-hal yang dapat menghambat faktor pendukung tersebut, diantaranya :

1. Kebijakan dalam hal rekrut tenaga kesehatan masih terbatas, dan masih terjadi kelangkaan tenaga profesi;
2. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap pembiayaan bidang kesehatan tingkat Kabupaten terutama bagi program prioritas, sehingga program yang menjadi unggulan Kementerian kesehatan yang harus dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota tidak dibarengi dengan kebijakan anggaran.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam hal ini yang merupakan adanya keutamaan dalam menjaga lingkungan adalah adanya program pemerintah pusat yang mengharuskan bahwa setiap pembangunan berwawasan kesehatan, sarana kesehatan seperti RSUD maupun Puskesmas harus mempunyai Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), serta program pokok kesehatan lingkungan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam menentukan isu-isu strategis yang akan tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri hilir Tahun 2019-2023 telah dilakukan beberapa tahapan antara lain :

1. Melakukan forum diskusi untuk menentukan permasalahan atau alternatif permasalahan yang dihadapi yang merupakan faktor internal (kekuatan dan kelemahan OPD) dan eksternal (peluang dan ancaman/tantangan OPD);
2. Melakukan Penetapan Isu-isu strategi

Dari hasil diskusi yang dilakukan, maka penentuan isu-isu strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- a. Status gizi masyarakat yang masih rendah.
- b. Meningkatnya penyakit tidak menular.
- c. Masih tinggi nya Penyakit Menular di Masyarakat.
- d. Akses Pelayanan Kesehatan yang belum optimal
- e. Pemahaman dan Kesadaran masyarakat tentang PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) masih rendah.
- f. Akses sanitasi jamban masih sangat rendah
- g. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi
- h. Rendahnya persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
- i. Pemenuhan kebutuhan obat, fasilitas kesehatan dan alat kesehatan yang belum memadai
- j. Fasilitas Kesehatan ( Sarana dan Prasarana ) Belum cukup dan belum merata
- k. Manajemen Puskesmas yang di Akreditasi dan Penataan Sistem Informasi Kesehatan
- l. Belum Tercukupi SDM Kesehatan

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir

#### 4.1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam menjalan visi dan misi Kepala Daerah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri dalam kurun waktu 2018 - 2023 adalah :

- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Indikator :

- Angka harapan hidup

Program yang mendukung:

- a) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d) Pelayanan Kesehatan Balita
- e) Pelayanan Kesehatan Pendidikan Dasar
- f) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- g) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- h) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i) Pelayanan Kesehatan Penderita DM
- j) Pelayanan Kesehatan ODGJ
- k) Pelayanan Kesehatan Terduga TB
- l) Pelayanan Kesehatan Orang Resiko Terinfeksi HIV

#### 4.2. Sasaran

Sedangkan rencana sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir pada akhir tahun 2023 yang tercermin dalam pencapaian indikator , yaitu:

- a. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana

Indikator :

- Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Indikator :

- Akreditasi FKTP dan RS
- Indeks Kepuasan Masyarakat

- c. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir

Indikator :

- Indeks Reformasi Birokrasi
- Nilai Evaluasi RB Dinas Kesehatan atas komponen pengungkit
- Nilai AKIP

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2023**

Tabel 4.1  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
			Realisasi			Target	
			2019	2020	2021*	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	67%	68%	68%	69%	70%
1	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	75	79	83	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Akreditasi FKTP dan RS	75%	85%	95%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90	97	98	100	100
2	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	Indeks Repormasi Birokrasi Dinas Kesehatan		65	68	70	75
1	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Evaluasi RB Dinas Kesehatan atas komponen pengungkit		17.80	18.91	20	20
		Nilai AKIP Dinas Kesehatan	CC	CC	B	BB	BB

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### 5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pencapaian sasaran tersebut ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara. Umur Harapan Hidup (UHH) dipengaruhi oleh Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), prevalensi kekurangan gizi serta kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Strategi peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan menitik beratkan pada upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui inovasi pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, mudah diakses dan terjangkau.

Untuk mencapai dan mewujudkan Visi, oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir pada akhir tahun 2023, maka peran Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan berdasarkan kebijakan sebagai berikut :

##### 1. Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan.

Untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dalam upaya pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan perlu dilakukan revitalisasi sarana kesehatan dengan konsep setiap desa minimal ada satu Puskesmas Pembantu, puskesmas dibangun sesuai dengan standar bangunan dan tata ruang yang memenuhi standar serta peningkatan pelayanan kesehatan 24 jam. Agar pembangunan kesehatan dapat terselenggara secara berhasil-guna dan berdaya-guna, diperlukan sumber daya manusia/tenaga kesehatan yang bermutu, cukup jumlah dan jenisnya, serta tersebar secara adil dan merata sesuai kebutuhan dan tuntutan dan tantangan dimasa datang.

Guna menjamin ketersediaan sumber daya pembiayaan kesehatan, maka Dinas Kesehatan melakukan advokasi dan sosialisasi kepada stakeholder di tingkat pusat, propinsi dan daerah. Ditingkat pusat (Depkes) dalam rangka mendapatkan sumber dana dari APBN ataupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan daerah terpencil, maka penyediaan dana khusus dari anggaran pemerintah perlu tetap dialokasi di dalam APBD Kabupaten maupun APBD provinsi dan APBN.

## 2. Pelaksanaan Upaya Kesehatan

Disamping itu upaya kesehatan bagi penduduk miskin, penanggulangan masalah gizi kurang dan buruk pada balita dan ibu hamil, pengendalian dan pencegahan kematian pada ibu dan bayi pada persalinan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta imunisasi, peningkatan mutu sanitasi dasar promosi kesehatan dan pendaya-gunaan tenaga kesehatan perlu mendapatkan pengutamakan dan penanganan secara komprehensif.

Untuk menjamin sumber daya obat-obatan dan perbekalan kesehatan, dilaksanakan penyediaan dan pendistribusian obat serta perbekalan kesehatan, sehingga akan tersedia obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat, serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat. Dinas Kesehatan menjamin ketersediaan obat sangat esensial di Puskesmas, karena menggunakan sistem buffer stock

## 3. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat termasuk sektor swasta mestilah berperan aktif dan berkontribusi secara nyata dalam pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat baik melalui UKBM maupun bentuk lainnya dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan kesinambungan dalam pelayanan kesehatan secara preventif maupun promotif.

Dalam strategi perencanaan masyarakat harus dilibatkan untuk mendapatkan aspirasi kebutuhan masyarakat terhadap upaya pelayanan kesehatan, mendapatkan gambaran masalah kesehatan yang sering terjadi serta bagaimana menggiring masyarakat bisa mandiri terhadap upaya-upaya menyelesaikan permasalahan kesehatan yang terjadi dilingkungan dan keluarganya.

Untuk mendukung upaya tersebut perlu ditingkatkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM), dengan meningkatkan desa menjadi desa siaga aktif, revitalisasi Posyandu serta UKBM penting lainnya.

## 4. Penggalangan Kemitraan Lintas Sektor

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan kerja sama lintas sektor yang mantap, dibangun melalui Memorandum of Understanding (MoU). Demikian pula optimalisasi pembangunan berwawasan kesehatan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, menuntut adanya penggalangan kemitraan lintas sektor dan segenap potensi daerah. Kerja sama lintas sektor harus dilakukan sejak proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, sampai pada pengawasan dan penilaiannya.

Disamping itu pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan melalui subsidi silang dan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Masyarakat (JKM) agar menjadi anggota BPJS. Sedangkan kemitraan dengan sektor swasta diarahkan pada pengembangan upaya kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan peran swasta dalam upaya kesehatan masyarakat.

5. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir akan efektif dan efisien bila upaya pengawasan internal secara terus menerus ditingkatkan intensitas dan kualitasnya melalui pemantapan sistem dan prosedur pengawasan melekat dari Pimpinan (Kepala Dinas) kepada bawahan dan jajarannya secara berjenjang. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan berbasis kinerja . Evaluasi dilakukan dengan menilai pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 5.1**

**Strategi dan Arah Kebijakan Pelayanan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023**

Visi : UNTUK KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT			
Misi 4 : Memantapkan Pembangunan SDM Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya saing, Serta Meningkatkan Iman dan Taqwa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana	1. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat	1. Meningkatkan persentase sarana dan prasarana untuk melayani aksesibilitas masyarakat
		2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan melalui Penataan Ruang	2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan melalui Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1. Peningkatan Mutu Fasyankes sesuai standar	1. Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan dengan menyusun standart pelayanan, menyediakan data dan informasi yang akurat, valid, up to date dan menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, monev, pelaporan yang akuntabel
		2. Pemenuhan Pusling Darat dan Laut	2. Pengadaan pusling dalam upaya melancarkan akses pelayanan kesehatan
		3. Pengembangan sumber daya kesehatan yang bermutu dan berkualitas	3. Mengelola SDM kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan

		<p>4. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan profesional, terjangkau, terpadu, bermitra, dan berkesinambungan</p> <p>5. Pengembangan system manajemen dan Informasi kesehatan yang profesional transparan, berdayaguna dan berhasilguna</p>	<p>4. pemerataan pelayanan kesehatan serta kualitas sumber daya manusia</p> <p>5. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir akan efektif dan efisien bila upaya pengawasan internal secara terus menerus ditingkatkan intensitas dan kualitasnya melalui pemantapan sistem dan prosedur pengawasan melekat dari Pimpinan (Kepala Dinas) kepada bawahan dan jajarannya secara berjenjang. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan berbasis kinerja . Evaluasi dilakukan dengan menilai pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan</p>
		<p>6. Melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)</p> <p>7. Perencanaan SDM sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan</p>	<p>6. Menyediakan SDM berkualitas dalam mendukung PIS PK serta Dukungan anggaran dalam kelancaran PIS-PK</p> <p>7. Pemenuhan dan Pemerataan SDM di Fasyankes</p>

Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	1. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	1 Penguatan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing.	Penyusunan SOP dan Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik
		2 Peningkatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan.	Hormonirisasi Produk Hukum

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain, Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Tabel 6.1  
Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2019 - 2020  
(Permendagri 13 Tahun 2006)

Tujuan/Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				K	Rp	K	RP	
<b>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>		.....						
<b>Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan</b>		.....						
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>PERSENTASE TERPENUHNYA KEBUTUHAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		87,0	10.002,80	87	8.500,38	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan jasa surat menyurat	1.01.02.01.01.001	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	15,00	100,0	15,00	100	7,50	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.01.02.01.01.002	Jumlah Rekening yang dibayarkan	168,70	100,0	470,20	99,9	375,05	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	1.01.02.01.01.006	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	30,56	87,8	35,31	100	40,20	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.01.02.01.01.008	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	42,38	97,1	41,74	97,2	43,52	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1.01.02.01.01.009	Jumlah Perlatan kerja yang dipelihara/Service	50,00	100,0	53,50	56,0	11,75	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan alat tulis kantor	1.01.02.01.01.010	Jumlah ATK yang disediakan	74,96	99,2	50,50	100	32,43	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.01.02.01.01.011	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	43,84	100,0	32,60	100	8,85	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.01.02.01.01.015	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	48,21	99,3	11,91	99,1	11,89	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan bahan logistik kantor	1.01.02.01.01.016	Jumlah logistik yang disediakan	87,16	85,4	72,61	96,8	29,51	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan makanan dan minuman	1.01.02.01.01.017	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	74,25	100,0	60,00	100	20,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.01.02.01.01.018	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	691,06	100,0	438,47	99,1	105,26	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1.01.02.01.01.019	Tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	7.553,21	97,5	8.564,80	98,3	7.756,39	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1.01.02.01.01.020	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	676,48	97,1	156,16	91,2	58,02	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>PERSENTASE TERPENUHNYA SARANA PRASARANA KANTOR dan PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR</b>		66,24	3.543,30	69	539,47	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Rumah Dinas	1.01.02.01.02.002	Jumlah rumah dinas yang dibangun				99,3	47,46	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Gedung Kantor	1.01.02.01.02.003	Jumlah gedung yang dibangun	786,60	89,5	609,69	98,0	66,94	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan kendaraan dinas / operasional	1.01.02.01.02.005	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	578,32	89,6	488,31	91,8	90,86	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.01.02.01.02.007	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan		97,4	688,62			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.01.02.01.02.009	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	179,79	93,4	986,24	100	55,60	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.01.02.01.02.022	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	488,62	99,7	139,51	0	-	Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	1.01.02.01.02.024	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	76,49	22,0	48,32	89	165,23	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah dinas	1.01.02.01.02.041	Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi	99,89					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1.01.02.01.02.042	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	270,20	98,1	127,51	0	-	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Furniture dan Interior Gedung Kantor	1.01.02.01.02.050	Jumlah Furniture dan Interior Gedung Kantor yang disediakan	77,64	96,5	455,10	61,1	99,44	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.01.02.01.02.052	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				99,4	69,55	Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>PERSENTASE PENINGKATAN ASN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN dan KETERAMPILAN KHUSUS</b>		14,0	2.411,04	197	613,26	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal	1.01.02.01.05.001	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	572,28	98,4	1.878,51	96,9	588,82	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	1.01.02.01.05.003	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	188,48	98,6	532,53	92,0	24,44	Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA &amp; KEUANGAN</b>		<b>PERSENTASE TERCAPAINYA PENYUSUNAN DOKUMEN CAPAIAN KINERJA dan KEUANGAN</b>		61,0	181,33	89	205,66	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.01.02.01.06.001	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	48,91	96,0	108,36	100	59,32	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.01.02.01.06.004	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	54,89	100,0	72,97	84,2	32,77	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Penataan Manajemen Aset Barang Milik Daerah pada SKPD	1.01.02.01.06.006	Jumlah Aset Milik Daaerah yang ditata				91,2	113,57	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN/KANTOR/INSTANSI BAGIAN</b>		<b>JUMLAH DOKUMEN PENUNJANG PROGRAM KERJA</b>		0,0	-	9,0	160,58	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Penyusunan Program Kerja	1.01.02.01.07.001	Jumlah Dokumen Program Keerja yang disusun	206,91					Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan</b>								
<b>PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>		<b>PERSENTASE KEBUTUHAN OBAT,BAHAN KEDIS HABIS PAKAI (BMHP) dan VAKSIN DI PUSKESMAS</b>		23,0	8.792,86	63	9.192,77	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penyusunan Program Kerja	1.01.02.01.07.001	Jumlah Dokumen Program Keerja yang disusun				96,3	158,38	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	1.01.02.01.15.001	Persentase Meningkatnya kesehatan masyarakat	1.827,93	39,6	1.081,73	94,4	2.748,88	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.01.02.01.15.005	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian	291,25	94,7	208,29	89,9	13,16	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK dan Pendamping DAK)	1.01.02.01.15.007.	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	7.078,41	99,4	7.323,53	98,1	6.414,24	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Produksi Distribusi Kefarmasian	1.01.02.01.15.011	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sarana Produksi Distribusi Kefarmasian	137,44	96,6	179,30	76,0	10,17	Bidang Sumber Daya Kesehatan

<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>JUMLAH KUNJUNGAN SAKIT</b>						Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan, Bidang Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	1.01.02.01.16.002	Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Penggunaan NAPZA	273,98	87,8	324,63	86,2	54,94	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Revitalisasi Sistem Kesehatan	1.01.02.01.16.006	Jumlah Puskesmas BLUD dan Pemantapannya	838,24	99,0	696,22	97,8	459,22	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.01.02.01.16.009	Jumlah Puskesmas yang dibentuk tim pembina UKS Kabupaten		100,0	49,84	87,9	63,67	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jampersal	1.01.02.01.16.010	Jumlah peserta jamkesmas dan jampersal yang mendapatkan Pelayanan		77,1	1.155,76	28,8	28,78	Bidang Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	1.01.02.01.16.012	Persentase Peningkatan Cakupan BBL yang mendapat IMD	430,16	90,7	267,11	81,3	59,73	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	1.01.02.01.16.011	Persentase Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	18.105,15	94,6	33.730,15	98,8	25.231,43	Bidang Pelayanan Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Gudang Farmasi	1.01.02.01.16.	Persentase Pembiayaan operasional gudang farmasi	348,64					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengelolaan dan Pemeliharaan Gudang Farmasi	1.01.02.01.16.018	Jumlah Gudang Farmasi yang dikelola dan dipelihara		97,8	592,26	90,6	65,34	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Biaya Operasional dan pemeliharaan Laboratorium	1.01.02.01.16.019.	Persentase Laboratorium yang dikelola dan dipelihara	297,32	98,5	242,27	99,4	40,45	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar	1.01.02.01.16.022	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pembinaan Terhadap Petugas Puskesmas	661,26	98,7	404,38	97,0	104,50	Bidang Kesehatan Masyarakat
Bantuan Operasional Kesehatan (Dana Alokasi Khusus)	1.01.02.01.16.053	Persentase penyelesaian biaya operasional kesehatan di wilayah Kab.Inhil	17.084,73	95,7	21.889,30	94,1	17.051,15	Bidang Sumber Daya Kesehatan

Jaminan Persalinan (Dana Alokasi Khusus)	1.01.02.01.16.054	Cakupan Persalinan yang ditolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten	4.706,34	92,2	4.507,76	88,0	4.175,65	Bidang Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Tradisional	1.01.02.01.16.055	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional	164,76	93,7	233,03	97,9	96,15	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak Menular	1.01.02.01.16.056	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat	387,75	89,8	625,01	94,3	48,82	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.01.02.01.16.057	Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas	411,32	86,2	517,61	81,6	67,29	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Gudang Farmasi (DAK)	1.01.02.01.16.058	Persentase Pembiayaan operasional gudang farmasi bersumber dari dana pusat	546,99	78,2	86,00	19,3	25,84	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sungai Iliran	1.01.02.01.16.059	Persentase Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional		90,3	457,67	76,9	389,78	Bidang Pelayanan Kesehatan
Revitalisasi Sistem Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.02.1.02.01.16.	Jumlah Puskesmas BLUD dan Pemantapannya				62,6	166,94	Bidang Pelayanan Kesehatan
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak Menular (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.02.1.02.01.16.	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat,diabetes dan hipertensi				82,5	663,00	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.02.1.02.01.16.	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas				67,2	67,16	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (DAK)	1.02.1.02.01.19.	Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup				62,9	91,94	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pendidikan dan Pelatihan Formal (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.05.	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				0,0	-	Bidang Sumber Daya Kesehatan

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.28.	Persentase Pembinaan Puskesmas Mampu PONED				94,7	84,60	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.32.	Persentase Pelayanan Kesehatan Program KIA				52,2	100,81	Bidang Kesehatan Masyarakat
Peningkatan, Pengembangan Sanitasi Dasar dan Air Minum (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.21	Persentase pelaksanaan pengawasan sanitasi dasar dan air minum				88,4	166,43	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan (DAK)	1.01.02.01.17	Persentase Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan				83,9	106,65	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Sadar Hidup Sehat (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.19	Persentase peserta yang mengikuti pemberdayaan untuk Peningkatan peran				74,4	111,63	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jampersal (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.16	Persentase peserta jamkesmas dan jampersal yang mendapatkan Pelayanan				80,9	64,13	Bidang Pelayanan Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Kota (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.02.1.02.01.16.53.	Persentase Tertanggungnya Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Wilayah Kab.Inhil				82,2	191,40	Bidang Pelayanan Kesehatan
<b>PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>		<b>PERSENTASE PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>			749,52	15,75	62,83	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	1.01.02.01.17.001	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	111,45	99,4	338,73	85,6	49,66	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	1.01.02.01.17.002	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya	198,47	93,1	410,79	64,1	13,16	Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (DAK)	1.02.04.201.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					75,3	42,05	Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</b>		<b>PERSENTASE GIZI BURUK</b>					12,0	25,66	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	1.01.02.01.18.002	Jumlah kegiatan dalam upaya pencapaian keluarga sadar gizi					87,2	25,66	Bidang Kesehatan Masyarakat
<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<b>PERSENTASE RUMAH TANGGA PHBS</b>				1.367,78	14	787,25	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	1.01.02.01.19.001	Jumlah pelaksanaan Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	945,01	98,9	478,74		93,7	562,86	Bidang Kesehatan Masyarakat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	1.01.02.01.19.002	Jumlah pelaksanaan penyuluhan Pola Hidup Sehat	294,40	90,3	368,83		90,2	90,77	Bidang Kesehatan Masyarakat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.01.02.01.19.004	Jumlah Puskesmas dengan kemampuan/kesadaran, disiplin dan kinerja tenaga kesehatana di UPT Puskesmas se-Kab. Inhil yang ditingkatkan	117,52	92,2	102,01		83,5	46,98	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Sadar Hidup Sehat	1.01.02.01.19.005	Jumlah peserta yang mengikuti pemberdayaan untuk Peningkatan peran serta masyarakat demi terwujudnya kesehatan	257,65	93,8	418,21		80,0	86,65	Bidang Kesehatan Masyarakat
<b>PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>		<b>RASIO KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN</b>					27	136,10	Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pemenuhan SDM Kesehatan	1.01.02.01.20.001	Persentase rasio ketersediaan tenaga kesehatan					98,1	122,97	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pendayagunaan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan Daerah Khusus	1.01.02.01.20.003	Persentase pemenuhan dokter kesehatan untuk Layanan Paripurna					81,5	13,13	Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>		<b>PERSENTASE DESA SEHAT</b>				1.980,96	11	474,75	Bidang Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pengawasan Sarana TTU/TPM, Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.01.02.01.21.005	Persentase pengawasan terhadap sarana TTU/TPM dan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	239,08	94,9	427,80		70,5	318,52	Bidang Kesehatan Masyarakat
Peningkatan, Pengembangan Sanitasi Dasar dan Air Minum	1.01.02.01.21.006	Persentase pelaksanaan pengawasan sanitasi dasar dan air minum	349,73	90,0	1.402,45		56,3	127,91	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan, Pengawasan Limbah dan Sampah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.01.02.01.21.007	Persentase pelaksanaan pengawasan limbah dan sampah fasyankes	115,05	71,7	150,71		31,0	28,32	Bidang Kesehatan Masyarakat
<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</b>		<b>PERSENTASE ANGKA KESAKITAN</b>				3.773,79	42	1.741,82	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	1.01.02.01.22.001.	Jumlah Fogging Fokus DBD - Workshop Fogging - Bimbingan Teknis Fogging - Konsultasi Fogging yang dilaksanakan	317,11	97,8	812,34		96,4	326,41	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	1.01.02.01.22.004.	Persentase pelaksanaan BIAS di kabupaten indragiri hilir	137,54	98,7	143,01		81,8	10,00	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.01.02.01.22.005.	Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya Penanggulangan Terhadap Penularan Penyakit Menular Langsung dan Tidak Langsung	473,00	97,9	515,76		83,6	152,15	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Peningkatan Imunisasi	1.01.02.01.22.008.	Persentase pelaksanaan penunjang program imunisasi	801,93	89,9	359,78		91,4	92,31	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Wabah Virus	1.02.1.02.01.22.06	Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Wabah Virus					92,3	15.888,94	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah	1.01.02.01.22.009.	Persentase Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Menular Yang Berpotensi KLB/Wabah yang dilaksanakan	746,10	83,6	222,98		67,8	608,98	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS	1.01.02.01.22.012.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	231,87	85,2	42,61		89,3	68,47	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penanggulangan dan Pemberantasan Filariasis	1.01.02.01.22.014.	Persentase pelaksanaan kegiatan Transmission Assessment Urvey/TAS	487,30	95,6	341,40		73,2	36,22	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru	1.01.02.01.22.016.	Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	330,35	96,7	286,68		89,1	343,67	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sistem Registrasi Sample (SRS)	1.01.02.01.22.017.	Persentase prevalensi dan distribusi kejadian kematian yang disebabkan	37,15	80,1	48,37		53,8	2,38	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji	1.01.02.01.22.019.	Persentase Jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan		90,4	571,07		92,5	23,92	Bidang Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Cakupan Tatalaksana dan Kualitas Program Pengendalian Malaria	1.01.02.01.22.020.	Persentase Penderita Malaria diobati sesuai standar 100% dan mampu mempertahankan status eliminasi malaria		95,6	429,79		85,3	109,54	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.22.21	Persentase Jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan					88,5	44,26	Bidang Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Imunisasi (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.22.22	Persentase pelaksanaan penunjang program imunisasi					92,0	45,98	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan penanggulangan wabah (DAK)	1.01.02.01.22.23	Persentase Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Menular Yan					89,1	7.819,79	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.22.24	Persentase pelaksanaan BIAS di kabupaten indragiri hilir					94,7	47,37	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>		<b>PERSENTASE PUSKESMAS TERAKREDITASI</b>							Bidang Pelayanan Kesehatan
					8.627,59	42	562,11		
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	1.01.02.01.23.003.	Jumlah Sosialisasi/pelatihan data informasi perizinan dibidang kesehatan bagi tenaga puskesmas yang dilaksanakan	366,27	96,6	509,93	96,8	48,39		Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penetapan Standar Akreditasi dan Perizinan Sarana dan Prasarana Kesehatan	1.01.02.01.23.009.	Persentase Pemutakhiran Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga	121,20	94,5	135,06	94,8	32,83		Bidang Pelayanan Kesehatan
Rapat Kerja Kesehatan Kabupaten	1.01.02.01.23.010.	Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan	182,95						Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	1.01.02.01.23.011.	Persentase Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang mengimplementasikan Sistem Informasi Kesehatan	6.613,08	92,0	1.278,28				Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Penyusunan Standar Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.23.012.	Persentase puskesmas uang menerapkan Standar Pelayanan Kesehatan Primer	1.925,53	80,3	1.205,25	48,2	431,37		Bidang Pelayanan Kesehatan
Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi	1.01.02.01.23.013.	Persentase puskesmas yang dinilai berprestasi		85,1	123,50	96,7	49,53		Bidang Pelayanan Kesehatan
Pengembangan Jaringan Komunikasi Data	1.01.02.01.23.014.	Jumlah Puskesms yang ditingkatkan kualitas Akses Jaringannya		96,8	5.375,57	100,0	95,74		Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA</b>		<b>JUMLAH FASYANKES SESUAI STANDAR</b>			29.860,16	0	30.482,55		Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Puskesmas	1.01.02.01.25.001.	Jumlah puskesmas yang dibangun	-	92,8	8.674,39	99,3	189,51		Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Puskesmas Pembantu	1.01.02.01.25.002.	Persentase pustu yang dibangun dan direlokasi	1.783,93	54,2	238,30	99,6	205,41		Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Puskesmas Keliling	1.01.02.01.25.006.	Jumlah pusling yang disediakan	2.294,43	63,9	345,14	100	172,75		Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pengadaan Puskesmas Keliling (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.25.004.	Jumlah pusling yang disediakan ( DAK)		43,9	619,10	83,1	1.080,00	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	1.01.02.01.25.007.	Persentase sarana dan prasaranan Puskesmas yang disediakan	2.304,41	84,3	1.306,57	99,8	509,74	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	1.01.02.01.25.007.	Persentase sarpras Puskesmas Pembantu yang disediakan	933,58	99,7	978,15	99,7	12.358,58	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	1.01.02.01.25.014.	Sarana Prasarana Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan		42,0	253,65	99,5	452,20	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	1.01.02.01.25.015.	Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu yang dilakukan pemeliharaan		64,3	99,61	98,9	86,60	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	1.01.02.01.25.021.	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi	967,22			98,9	46,77	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	1.01.02.01.25.024.	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi				99,9	199,86	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK)	1.01.02.01.25.	Jumlah puskesmas yang dibangun	3.273,29	97,0	8.958,72			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.25.	Persentase Rehabilitasi Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK)	-					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	1.01.02.01.25.035.	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	1.685,14	97,4	4.027,58	97,6	8.058,94	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan	1.01.02.01.25.035.	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	-	94,4	293,77	67,1	18,29	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Dasar Bidang Kesehatan	1.01.02.01.25.37	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Dasar Bidang Kesehatan				89,5	588,22	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penunjang Dasar Bidang Kesehatan	1.01.02.01.25.037.	Persentase penunjang pembangunan dan peningkatan sarkes		68,2	553,57			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penunjang Dasar Bidang Kesehatan (DAK)	1.01.02.01.25.	Persentase Penunjang Dasar Bidang Kesehatan (DAK)		86,8	2.227,44	97,1	682,30	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.25.	Persentase sarana dan prasaranan Puskesmas yang disediakan		98,4	1.284,17	99,1	5.846,92	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penyediaan Dasar Bidang Kesehatan	1.01.02.01.25.	Persentase Penyediaan Dasar Bidang Kesehatan	189,38					Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penyediaan Dasar Bidang Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.25.	Persentase Penyediaan Dasar Bidang Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	2.032,61					Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)	1.01.02.01.25.40	Sarana Prasarana Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan				99,1	79,30	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Rumah Dinas (DAK)	1.01.02.01.25.41	Jumlah Rumah Dinas Yang Dibangun				90,5	2.171,27	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Puskesmas (Dana Insentif Daerah/DID)	1.01.02.01.25.42	Jumlah puskesmas yang dibangun				99,8	59,90	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (Dana Insentif Daerah/DID)	1.01.02.01.25.43	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi				99,7	59,84	Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>		<b>PERSENTASE KEMITRAAN ORGANISASI PROFESI dan LSM KESEHATAN</b>			252,18	25	61,32	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	1.01.02.01.28.005.	Persentase Pembinaan Puskesmas Mampu PONED	261,44	97,8	190,98	96,3	13,09	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Kemitraan dan Pembinaan Organisasi Profesi Kesehatan	1.01.02.01.28.009.	Persentase Organisasi Profesi kesehatan yang bermitra dan dibina	64,29	94,8	61,21	92,2	48,23	Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA</b>		<b>PERSENTASE KEPUASAN MASYARAKAT</b>			39,63	54	21,35	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembinaan, Pemantauan dan Pelayanan Usia Lanjut	1.01.02.01.30.008.	Persentase dari evaluasi program lansia	73,05	88,4	39,63	81,8	21,35	Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK</b>		<b>PERSENTASE AKI-AKB</b>			333,92	52	37,01	Bidang Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.01.02.01.32.004.	Persentase Pelayanan Kesehatan Program KIA	516,61	99,0	333,92	100	37,01	Bidang Kesehatan Masyarakat
<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD</b>		<b>PERSENTASE PUSKESMAS BLUD</b>			25.263	55,0	28.270	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
<b>PROGRAM MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN</b>		<b>CAKUPAN MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN</b>			772,55	7	2.258,02	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Penyusunan Profil Daerah	1.01.02.01.46.001.	Jumlah dokumen profil kesehatan yang dirangkum dari data-data dinkes & Pkm	145,87	92,2	145,24	86,1	132,36	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Koordinasi, Sosialisasi, Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	1.01.02.01.46.002.	Jumlah Dokumen Perencanaan APBD Kabupaten		96,6	627,31	97,1	317,44	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	1.01.02.01.46.003.	Persentase terbentuknya sistem pengelolaan dan penyimpanan data terpadu				95,0	536,84	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Pengembangan jaringan komunikasi data	1.01.02.01.23.014.	Persentase Puskesmas yang ditingkatkan kualitas Akses Jaringannya				91,0	698,92	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Kegiatan . . .		. . . . .						
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>JUMLAH PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>						Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	1.01.02.01.06.006	Jumlah Aset Milik Daerah yang ditata						Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Tabel 6.2  
 Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan  
 Kabupaten Indragiri Hilir  
 Tahun 2021  
 (Keppmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)

Tujuan/Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan dan Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2021		
				K	Rp	
<b>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>		.....				
<b>Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan</b>		.....				
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>PERSENTASE TERPENUHNYA KEBUTUHAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		93,0	128.650	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan jasa surat menyurat	1.02.01.1.08.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,00			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.02.01.201.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		97,8	158	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.02.01.201.06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		87,1	97	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.02.01.1.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	168,70			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	1.02.01.01.06	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30,56			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.02.01.01.08	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	42,38			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1.02.01.01.09	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	50,00			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan alat tulis kantor	1.02.01.01.10	Jumlah alat tulis kantor	74,96			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.02.01.1.06.05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	43,84			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.02.01.1.06.06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48,21			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan bahan logistik kantor	1.02.01.1.06.04	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	87,16			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan makanan dan minuman	1.02.01.01.17	Jumlah makanan dan minuman	74,25			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.02.01.01.18	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	691,06			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1.02.01.01.019.	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	7.553,21			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1.02.01.1.06.09	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	676,48			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.02.01.202.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		90,6	66.522	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.02.01.202.05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,0	39	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.02.01.203.06	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		77,8	86	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.02.01.205.09	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		95,3	581	Bidang Sumber Daya Kesehatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.02.01.206.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		95,9	355	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.02.01.206.04	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		93,6	89	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.02.01.206.05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100,0	9	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.02.01.206.06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		89,6	11	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.02.01.206.09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		68,5	123	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.02.01.207.02	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		95,9	117	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.02.01.208.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,0	8	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.02.01.208.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		79,5	418	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.02.01.208.03	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		96,4	49	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.02.01.208.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		97,0	9.294	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.02.01.209.02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		79,3	100	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.02.01.209.06	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		86,6	69	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.210.	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kotabaru	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		60,0	1.690	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sungai Salak	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		77,5	1.196	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Batang Tumu	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		86,8	354	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Benteng	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		82,5	612	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Concong Luar	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		52,2	805	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Enok	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		75,4	657	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gajah Mada	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		90,9	2.836	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kempas Jaya	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		85,2	2.002	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kuala Enok	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		98,6	1.135	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kuala Lahang	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		94,9	1.670	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Mandah	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		85,4	1.813	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelangiran	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		75,7	809	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengalihan Enok	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		60,3	933	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengalihan Keritang	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		64,3	765	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pulau Burung	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		76,3	1.056	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pulau Kijang	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		79,0	1.744	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sapat	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		57,2	592	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Selensen	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		67,9	963	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sungai Guntung	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		82,9	1.469	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sungai Piring	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		71,7	1.539	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tanah Merah	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		50,5	1.074	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Teluk Belengkong	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		81,9	473	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Teluk Pinang	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		55,7	805	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tembilahan Hulu	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		80,3	2.794	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tembilahan Kota	1.02.01.210.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		64,6	1.593	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>Persentase Sumberdaya Kesehatan (SDMK) Yang Kompeten</b>	<b>60,00</b>	<b>92,0</b>	<b>3.248</b>	<b>Bidang Sumber Daya Kesehatan</b>
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.202.	Jumlah Sumberdaya Kesehatan (SDMK) Yang Kompeten		91,9	2.763	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.02.03.202.02	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		96,8	2.540	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.202.03	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		58,4	223	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.203.	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		93,7	227	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.203.01	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		93,7	227	Bidang Sumber Daya Kesehatan

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.201.	Persentase Ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan sesuai Standard	70,00	76,0	516	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.201.02	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		44,1	9	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.203.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		68,8	59	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.02.04.204.	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.02.04.204.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		72,5	160	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1.02.04.205.	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1.02.04.205.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		66,0	73	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	1.02.04.206.01	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		42,6	34	Bidang Sumber Daya Kesehatan

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	50,00	93,0	1.263	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.201.	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		80,2	270	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.02.05.201.01	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		80,2	270	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.202.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		84,8	63	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.02.05.202.01	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		84,8	63	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.203.	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		93,6	800	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.203.01	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		93,6	800	Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	1.02.02.201.	<b>JUMLAH PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Rumah Dinas	1.02.02.201.04	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Gedung Kantor	1.02.01.207.09	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	786,60			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan kendaraan dinas / operasional	1.02.01.207.02	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	578,32			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.02.01.208.03	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.02.01.208.03	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	179,79			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.02.01.209.09.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	488,62			Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	1.02.01.203.06	Jumlah Kendaraan Dinas / operasional yang Dilaksanakan Pemeliharaan	76,49			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah dinas	1.02.01.203.37	Jumlah Rumah Dinas yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	99,89			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1.02.01.203.38	Jumlah Gedung Kantor yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	270,20			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Furniture dan Interior Gedung Kantor	1.02.	Jumlah Furniture dan Interior Gedung Kantor	77,64			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.02.01.208.03	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>JUMLAH PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>				<b>Bidang Sumber Daya Kesehatan</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal	1.02.01.205.09	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	572,28			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	1.02.01.205.11	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	188,48			Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA&amp; KEUANGAN</b>		<b>JUMLAH PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA&amp; KEUANGAN</b>				<b>Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan</b>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.02.01.201.06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48,91			Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.02.01.202.09	Persentase Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	54,89			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penataan Manajemen Aset Barang Milik Daerah pada SKPD	1.01.02.01.06.006.	Jumlah Aset Milik Daerah yang ditata				Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN/KANTOR/INSTANSI BAGIAN</b>		<b>CAKUPAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN/KANTOR/INSTANSI BAGIAN</b>				<b>Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan</b>
Penyusunan Program Kerja	1.02.01.201.02	Persentase Dokumen Kerja Yang Disusun	206,91			Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan

<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan</b>		.....				
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	77,00	89,0	145.651	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	1.02.02.201.	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah		83,8	32.481	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Puskesmas	1.02.02.201.02	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		68,3	6.694	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.03	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		98,4	231	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.02.02.201.04	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		95,6	861	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengembangan Puskesmas	1.02.02.201.06	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		86,0	2.411	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.07	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		42,4	90	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.10	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		84,8	155	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.12	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		99,2	2.283	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.13	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		95,9	4.813	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.14	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		94,1	10.283	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1.02.02.201.15	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		82,6	82	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Obat, Vaksin	1.02.02.201.16	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		61,0	2.077	Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.02.02.201.17	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		85,0	2.065	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.18	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan		88,1	151	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.19	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan		93,1	70	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.21	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		96,6	217	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.202	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85,2	78.486	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.02.02.202.01	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		84,5	946	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.02.02.202.02	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		97,0	5.232	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.02.02.202.03	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		78,3	406	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.02.02.202.04	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		84,2	734	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.02.02.202.05	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		80,5	175	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.02.02.202.07	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		88,1	539	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.02.02.202.11	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		83,7	222	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.02.02.202.12	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		82,4	559	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.02.02.202.13	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		77,5	26.072	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.202.15	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		91,9	2.541	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.202.16	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		83,7	280	Bidang Kesehatan Masyarakat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.202.17	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		86,7	832	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.202.18	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		85,3	1.213	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1.02.02.202.19	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		92,1	95	Bidang Pelayanan Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.1.02.20	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		73,9	67	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.02.02.1.02.21	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		58,9	45	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.02.02.1.02.22	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		91,1	565	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.02.02.1.02.23	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		79,5	82	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1.02.02.1.02.24	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		4,5	9	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.1.02.25	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		82,8	2.930	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.02.1.02.26	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		99,2	29.090	Bidang Pelayanan Kesehatan
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.02.02.1.02.29	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		75,1	139	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	1.02.02.202.31	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan		88,2	149	Bidang Kesehatan Masyarakat
Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.202.33	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		78,5	2.573	Bidang Pelayanan Kesehatan
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.202.34	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		93,5	294	Bidang Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.02.02.202.35	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		8,5	220	Bidang Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.02.02.202.37	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		90,4	2.480	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.02.02.203.	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		80,5	1.692	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1.02.02.203.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		83,6	139	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan

Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1.02.02.203.03	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan		88,0	914	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.02.02.203.02	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		71,3	639	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.204.	Cakupan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		79,2	603	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.204.02	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		81,0	410	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.02.02.204.03	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		81,2	77	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.02.02.204.04	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		72,4	116	Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>		<b>PERSENTASE OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>				
Penyusunan Program Kerja	1.02.01.201.02	Persentase Dokumen Kerja Yang Disusun				Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	1.01.02.01.15.001	Persentase Meningkatnya kesehatan masyarakat	1.827,93			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.01.02.01.15.005.	Peersentase Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	291,25			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK dan Pendamping DAK)	1.01.02.01.15.007.	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	7.078,41			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Produksi Distribusi Kefarmasian	1.01.02.01.15.011.	Persentase Kegiatan Pembinaan Sarana Produksi Distribusi Kefarmasian	137,44			Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>CAKUPAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	1.01.02.01.16.002.	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Penggunaan NAPZA	273,98			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Revitalisasi Sistem Kesehatan	1.01.02.01.16.006.	Jumlah Puskesmas BLUD dan Pemantapannya	838,24			Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.01.02.01.16.009.	Persentase Puskesmas yang dibentuk tim pembina UKS Kabupaten				Bidang Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jampersal	1.01.02.01.16.010.	Persentase peserta jampersal yang mendapatkan Pelayanan				Bidang Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	1.01.02.01.16.012.	Persentase Peningkatan Cakupan BBL yang mendapat IMD	430,16			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	1.01.02.01.16.	Persentase Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	18.105,15			Bidang Pelayanan Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Gudang Farmasi	1.01.02.01.16.	Persentase Pembiayaan operasional gudang farmasi	348,64			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengelolaan dan Pemeliharaan Gudang Farmasi	1.01.02.01.16.018.	Persentase Gudang Farmasi yang dikelola dan dipelihara				Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Biaya Operasional dan pemeliharaan Laboratorium	1.01.02.01.16.019.	Persentase Laboratorium yang dikelola dan dipelihara	297,32			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar	1.01.02.01.16.022.	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pembinaan Terhadap Petugas Puskesmas	661,26			Bidang Kesehatan Masyarakat
Bantuan Operasional Kesehatan (Dana Alokasi Khusus)	1.01.02.01.16.053.	Persentase penyelesaian biaya operasional kesehatan di wilayah Kab.Inhil	17.084,73			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Jaminan Persalinan (Dana Alokasi Khusus)	1.02.1.02.01.16.54	Persentase Tertanggulangi Persalinan Masyarakat Oleh Tenaga Kesehatan	4.706,34			Bidang Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Tradisional	1.01.02.01.16.055.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional	164,76			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak Menular	1.01.02.01.16.056.	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat,diabetes dan hipertensi	387,75			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.01.02.01.16.057.	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas	411,32			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Gudang Farmasi (DAK)	1.01.02.01.16.058.	Persentase Pembiayaan operasional gudang farmasi bersumber dari dana pusat	546,99			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sungai Iliran	1.02.1.02.01.16.4	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				Bidang Pelayanan Kesehatan
Revitalisasi Sistem Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.02.1.02.01.16.	Jumlah Puskesmas BLUD dan Pemantapannya				Bidang Pelayanan Kesehatan
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak Menular (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.02.1.02.01.16.	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat,diabetes dan hipertensi				Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.02.1.02.01.16.	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas				Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (DAK)	1.02.1.02.01.19.	Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup				Bidang Kesehatan Masyarakat
Pendidikan dan Pelatihan Formal (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.05.	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				Bidang Sumber Daya Kesehatan

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.28.	Persentase Pembinaan Puskesmas Mampu PONED				Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.32.	Persentase Pelayanan Kesehatan Program KIA				Bidang Kesehatan Masyarakat
Peningkatan, Pengembangan Sanitasi Dasar dan Air Minum (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.21	Persentase pelaksanaan pengawasan sanitasi dasar dan air minum				Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan (DAK)	1.01.02.01.17	Persentase Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan				Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Sadar Hidup Sehat (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.19	Persentase peserta yang mengikuti pemberdayaan untuk Peningkatan peran				Bidang Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jampersal (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.16	Persentase peserta jamkesmas dan jampersal yang mendapatkan Pelayanan				Bidang Pelayanan Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Kota (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.02.1.02.01.16.53	Persentase Tertanggulangnya Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Wilayah Kab.Inhil				Bidang Pelayanan Kesehatan
<b>PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>		<b>JUMLAH PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>				
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	1.01.02.01.17.001.	Persentase Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	111,45			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	1.02.1.02.01.17.02	Persentase makanan dan minuman yang aman dari bahan berbahaya	198,47			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (DAK)	1.02.04.201.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</b>		<b>PERSENTASE PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</b>				
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	1.01.02.01.18.002.	Jumlah kegiatan dalam upaya pencapaian keluarga sadar gizi				Bidang Kesehatan Masyarakat
<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN</b>		<b>JUMLAH PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				

<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>						
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	1.02.1.02.01.19.01	Persentase Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup	945,01			Bidang Kesehatan Masyarakat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	1.02.1.02.01.19.02	Persentase Kemampuan Masyarakat Untuk Berperilaku Bersih dan Sehat di Rumah Tangga dan di Sekolah	294,40			Bidang Kesehatan Masyarakat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.02.1.02.01.19.04	Persentase Pegawai nakes yang memiliki kinerja dan disiplin yang baik untuk pelayanan yang optimal kepada masyarakat	117,52			Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Sadar Hidup Sehat	1.02.1.02.01.19.05	Persentase Meningkatnya peran dan fungsi posyandu dan Desa Siaga dalam menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan gizi buruk, memberdayakan masyarakat	257,65			Bidang Kesehatan Masyarakat
<b>PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>		<b>JUMLAH PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>				
Pemenuhan SDM Kesehatan	1.01.02.01.20.001	Persentase rasio ketersediaan tenaga kesehatan				Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pendayagunaan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan Daerah Khusus	1.01.02.01.20.003	Persentase pemenuhan dokter kesehatan untuk Layanan Paripurna				Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>		<b>PERSENTASE PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>				
Peningkatan Pengawasan Sarana TTU/TPM, Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.01.02.01.21.005.	Persentase pengawasan terhadap sarana TTU/TPM dan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	239,08			Bidang Kesehatan Masyarakat
Peningkatan, Pengembangan Sanitasi Dasar dan Air Minum	1.01.02.01.21.006.	Persentase pelaksanaan pengawasan sanitasi dasar dan air minum	349,73			Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan, Pengawasan Limbah dan Sampah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.01.02.01.21.007.	Persentase pelaksanaan pengawasan limbah dan sampah fasyankes	115,05			Bidang Kesehatan Masyarakat
<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</b>		<b>CAKUPAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</b>				
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	1.01.02.01.22.001.	Jumlah Fogging Fokus DBD - Workshop Fogging - Bimbingan Teknis Fogging - Konsultasi Fogging yang dilaksanakan	317,11			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	1.01.02.01.22.004.	Persentase pelaksanaan BIAS di kabupaten indragiri hilir	137,54			Bidang Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.01.02.01.22.005.	Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya Penanggulangan Terhadap Penularan Penyakit Menular Langsung dan Tidak Langsung	473,00			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Peningkatan Imunisasi	1.01.02.01.22.008.	Persentase pelaksanaan penunjang program imunisasi	801,93			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Wabah Virus	1.02.1.02.01.22.06	Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Wabah Virus				Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah	1.01.02.01.22.009.	Persentase Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Menular Yang Berpotensi KLB/Wabah yang dilaksanakan	746,10			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS	1.01.02.01.22.012.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	231,87			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penanggulangan dan Pemberantasan Filariasis	1.01.02.01.22.014.	Persentase pelaksanaan kegiatan Transmission Assessment Urvey/TAS	487,30			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru	1.01.02.01.22.016.	Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	330,35			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sistem Registrasi Sample (SRS)	1.01.02.01.22.017.	Persentase prevalensi dan distribusi kejadian kematian yang disebabkan	37,15			Bidang Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji	1.01.02.01.22.019.	Persentase Jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan				Bidang Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Cakupan Tatalaksana dan Kualitas Program Pengendalian Malaria	1.01.02.01.22.020.	Persentase Penderita Malaria diobati sesuai standar 100% dan mampu mempertahankan status eliminasi malaria				Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.22.21	Persentase Jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan				Bidang Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Imunisasi (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.22.22	Persentase pelaksanaan penunjang program imunisasi				Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan penanggulangan wabah (DAK)	1.01.02.01.22.23	Persentase Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Menular Yan				Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.22.24	Persentase pelaksanaan BIAS di kabupaten indragiri hilir				Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>		<b>CAKUPAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>				
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	1.01.02.01.23.003.	Jumlah Sosialisasi/pelatihan data informasi perizinan dibidang kesehatan bagi tenaga puskesmas yang dilaksanakan	366,27			Bidang Sumber Daya Kesehatan

Penetapan Standar Akreditasi dan Perizinan Sarana dan Prasarana Kesehatan	1.01.02.01.23.009.	Persentase Pemutakhiran Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga	121,20			Bidang Pelayanan Kesehatan
Rapat Kerja Kesehatan Kabupaten	1.01.02.01.23.010.	Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan	182,95			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	1.01.02.01.23.011.	Persentase Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang mengimplementasikan Sistem Informasi Kesehatan	6.613,08			Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Penyusunan Standar Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.23.012.	Persentase puskesmas yang menerapkan Standar Pelayanan Kesehatan Primer	1.925,53			Bidang Pelayanan Kesehatan
Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi	1.01.02.01.23.013.	Persentase puskesmas yang dinilai berprestasi				Bidang Pelayanan Kesehatan
Pengembangan Jaringan Komunikasi Data	1.01.02.01.23.014.	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan kualitas Akses Jaringannya				Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA</b>		<b>JUMLAH PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA</b>				
Pembangunan Puskesmas	1.01.02.01.25.001.	Jumlah puskesmas yang dibangun	-			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Puskesmas Pembantu	1.01.02.01.25.002.	Persentase puskesmas yang dibangun dan direlokasi	1.783,93			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Puskesmas Keliling	1.01.02.01.25.006.	Jumlah pusling yang disediakan	2.294,43			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Puskesmas Keliling (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.25.004.	Jumlah pusling yang disediakan ( DAK)				Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	1.01.02.01.25.007.	Persentase sarana dan prasarana Puskesmas yang disediakan	2.304,41			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	1.01.02.01.25.007.	Persentase sarpras Puskesmas Pembantu yang disediakan	933,58			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	1.01.02.01.25.014.	Sarana Prasarana Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan				Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	1.01.02.01.25.015.	Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu yang dilakukan pemeliharaan				Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	1.01.02.01.25.021.	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi	967,22			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	1.01.02.01.25.024.	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi				Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK)	1.01.02.01.25.	Jumlah puskesmas yang dibangun	3.273,29			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.25.	Persentase Rehabilitasi Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK)	-			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	1.01.02.01.25.035.	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	1.685,14			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan	1.01.02.01.25.036.	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	-			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Dasar Bidang Kesehatan	1.01.02.01.25.	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Dasar Bidang Kesehatan				Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penunjang Dasar Bidang Kesehatan	1.01.02.01.25.037.	Persentase penunjang pembangunan dan peningkatan sarkes				Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penunjang Dasar Bidang Kesehatan (DAK)	1.01.02.01.25.	Persentase Penunjang Dasar Bidang Kesehatan (DAK)				Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.25.	Persentase sarana dan prasarana Puskesmas yang disediakan				Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penyediaan Dasar Bidang Kesehatan	1.01.02.01.25.	Persentase Penyediaan Dasar Bidang Kesehatan	189,38			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penyediaan Dasar Bidang Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.25.	Persentase Penyediaan Dasar Bidang Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	2.032,61			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)	1.01.02.01.25.	Sarana Prasarana Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan				Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Rumah Dinas (DAK)	1.01.02.01.25.	Jumlah Rumah Dinas Yang Dibangun				Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Puskesmas (Dana Insentif Daerah/DID)	1.01.02.01.25.	Jumlah puskesmas yang dibangun				Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (Dana Insentif Daerah/DID)	1.01.02.01.25.	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi				Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>		<b>PERSENTASE KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>				
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	1.01.02.01.28.005.	Persentase Pembinaan Puskesmas Mampu PONE	261,44			Bidang Sumber Daya Kesehatan
Kemitraan dan Pembinaan Organisasi Profesi Kesehatan	1.01.02.01.28.009.	Persentase Organisasi Profesi kesehatan yang bermitra dan dibina	64,29			Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA</b>		<b>PERSENTASE PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA</b>				

Pembinaan, Pemantauan dan Pelayanan Usia Lanjut	1.01.02.01.30.008.	Persentase dari evaluasi program lansia	73,05			Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK</b>		<b>PERSENTASE PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK</b>				
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.01.02.01.32.004.	Persentase Pelayanan Kesehatan Program KIA	516,61			Bidang Kesehatan Masyarakat
<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD</b>		<b>CAKUPAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD</b>				
<b>PROGRAM MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN</b>		<b>CAKUPAN MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN</b>				
Penyusunan Profil Daerah	1.01.02.01.46.001.	Jumlah dokumen profil kesehatan yang dirangkum dari data-data dinkes & Pkm	145,87			Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Koordinasi, Sosialisasi, Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	1.01.02.01.46.002.	Jumlah Dokumen Perencanaan APBD Kabupaten				Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	1.01.02.01.46.003.	Persentase terbentuknya sistem pengelolaan dan penyimpanan data terpadu				Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Pengembangan jaringan komunikasi data	1.01.02.01.23.014.	Persentase Puskesmas yang ditingkatkan kualitas Akses Jaringannya				Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Kegiatan . . .		.....				
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>JUMLAH PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				

Tabel 6.3  
Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2021  
(Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)

Tujuan/Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan dan Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		
				K	Rp	K	Rp	
<b>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>		.....						
<b>Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan</b>		.....						
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	93	100,0	124.498	100	118.287	
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100	36.493	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		97,8	158	100	875	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.02.01.2.01.02	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.02.01.2.01.03	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.02.01.2.01.06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		87,1	97	100	400	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.02.01.2.02.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		90,6	66.522	100	81.453	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.02.01.2.02.05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,0	39	100	300	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.02.01.2.03.06	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		77,8	86	100	400	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.02.01.2.05.03	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					920	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.02.01.2.05.09	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		95,3	581	100	2.315	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.02.01.2.06.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		95,9	355	100	1.966	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.02.01.2.06.04	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		93,6	89	100	109	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.02.01.2.06.05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100,0	9	100	75	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	1.02.01.206.06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		89,6	11	100	150	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.02.01.2.06.09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		68,5	123	100	703	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.02.01.2.07.02	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		95,9	117	100	682	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.02.01.2.07.06	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					233	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.02.01.2.07.09	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100		Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.02.01.2.08.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,0	8	100	150	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.02.01.2.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		79,5	418	100	700	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.02.01.1.08.03	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		96,4	49	100	104	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.02.01.1.08.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		97,0	9.294	100	11.170	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.02.01.209.02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		79,3	100	100	542	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.02.01.2.09.06	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		86,6	69	100	435	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.02.01.2.09.09	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100	1.450	Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		Persentase Sumberdaya Kesehatan (SDMK) Yang Kompeten	60	95,0	581	98	3.160	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02..03.202.01	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				100	327	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.02.03.202.02	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		96,8	2.540	100	654	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.202.03	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		58,4	223	100	973	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.203.01	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		93,7	227	100	301	Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		Persentase Ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan sesuai Standard	70	100,0	251	100	534	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.201.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		68,8	59	100	150	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.201.02	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		44,1	9	100	132	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.201.03	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				100	249	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.203.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				100	153	Bidang Sumber Daya Kesehatan

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.02.04.204.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		72,5	160	100	548	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1.02.04.2.05.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		66,0	73	100	150	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	1.02.04.206.01	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		42,6	34	100	162	Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>						
Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15					

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.02.01.2.01.06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.02.01.1.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	169					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	1.01.02.01.01.006	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	31					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.01.02.01.01.008	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	42					Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1.01.02.01.01.009	Jumlah Peralatan kerja yang dipelihara/Service	50					Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan alat tulis kantor	1.01.02.01.01.010	Jumlah ATK yang disediakan	75					Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.01.02.01.01.011	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	44					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.01.02.01.01.015	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48					Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan bahan logistik kantor	1.01.02.01.01.016	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	87					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan makanan dan minuman	1.01.02.01.01.017	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	74					Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.01.02.01.01.018	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	691					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1.01.02.01.01.019	Jumlah Tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	7.553					Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1.01.02.01.01.020	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	676					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.02.01.202.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.02.01.202.05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.02.01.203.06	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.02.01.205.09	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.02.01.206.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.02.01.206.04	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.02.01.206.05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.02.01.206.06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.02.01.206.09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.02.01.207.02	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.02.01.208.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.02.01.208.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.02.01.208.03	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.02.01.208.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.02.01.209.02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.02.01.209.06	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.210.							
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kotabaru	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		60,0	1.690			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sungai Salak	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		77,5	1.196			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Concong Luar	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		52,2	805			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Enok	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		75,4	657			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengalihan Enok	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		60,3	933			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gajah Mada	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		90,9	2.836			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kempas Jaya	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		85,2	2.002			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tempuling	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		90,0	1.525			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kuala Enok	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		98,6	1.135			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kuala Lahang	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		95,0	1.670			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengalihan Keritang	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		64,4	765			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pulau Kijang	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		79,0	1.744			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Benteng	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		82,5	612			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Selensen	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		67,9	963			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Mandah	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		85,4	1.813			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Batang Tumu	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		86,8	354			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Pelangiran	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		75,7	809			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sapat	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		57,2	592			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sungai Guntung	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		82,9	1.469			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pulau Burung	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		76,3	1.056			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sungai Piring	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		71,7	1.539			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tanah Merah	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		50,5	1.074			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Teluk Belengkong	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		81,9	473			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Teluk Pinang	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		55,7	805			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tembilahan Hulu	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		80,3	2.794			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tembilahan Kota	1.02.01.210.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		64,6	1.593			Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	50	95,0	704	97	658	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.02.05.2.01.01	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		80,2	270	100	910	Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.02.05.2.02.01	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		84,8	63	100	150	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.01	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		93,6	800	100	420	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.01.02.01.01.002	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	169					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	1.01.02.01.01.006	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang	31					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.01.02.01.01.008	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	42					Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1.01.02.01.01.009	Jumlah Perlatan kerja yang dipelihara/Service	50					Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan alat tulis kantor	1.01.02.01.01.010	Jumlah ATK yang disediakan	75					Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.01.02.01.01.011	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	44					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.01.02.01.01.015	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	48					Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan bahan logistik kantor	1.01.02.01.01.016	Jumlah logistik yang disediakan	87					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan makanan dan minuman	1.01.02.01.01.017	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	74					Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.01.02.01.01.018	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	691					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1.01.02.01.01.019	Tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	7.553					Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1.01.02.01.01.020	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	676					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>JUMLAH PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>						
Pembangunan Rumah Dinas	1.01.02.01.02.002	Jumlah Rumah Dinas yang Telah Dibangun						Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Gedung Kantor	1.01.02.01.02.002	Jumlah Gedung Kantor yang Telah Dibangun	787					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan kendaraan dinas / operasional	1.01.02.01.02.005	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	578					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.01.02.01.02.007	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan						Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.01.02.01.02.009	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	180					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.01.02.01.02.022	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	489					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	1.01.02.01.02.024	Jumlah Kendaraan Dinas / operasional yang Dilaksanakan Pemeliharaan	76					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah dinas	1.01.02.01.02.041	Jumlah Rumah Dinas yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1.01.02.01.02.042	Jumlah Gedung Kantor yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	270					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Furniture dan Interior Gedung Kantor	1.01.02.01.02.050	Jumlah Furniture dan Interior Gedung Kantor	78					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.01.02.01.02.052	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>JUMLAH PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>						

Pendidikan dan Pelatihan Formal	1.01.02.01.05.003	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	572					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	1.01.02.01.05.002	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	188					Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA&amp; KEUANGAN</b>		<b>JUMLAH PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA&amp; KEUANGAN</b>						
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.01.02.01.06.001	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	49					Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.01.02.01.06.004	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	55					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penataan Manajemen Aset Barang Milik Daerah pada SKPD	1.01.02.01.06.006	Jumlah Aset Milik Daerah yang ditata						Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN/KANTOR/INSTANSI BAGIAN</b>		<b>CAKUPAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN/KANTOR/INSTANSI BAGIAN</b>						
Penyusunan Program Kerja	1.01.02.01.07.001	Jumlah Dokumen Program Keerja yang disusun	207					Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan</b>		.....						
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal</b>	<b>77</b>	<b>95,0</b>	<b>45.730</b>	<b>100</b>	<b>82.501</b>	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								

Pembangunan Puskesmas	1.02.02.201.02	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		68,3	6.694	100	336	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.03	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		98,4	231	100	3.910	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.02.02.201.04	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		95,6	861	100	4.536	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengembangan Puskesmas	1.02.02.201.06	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		86,0	2.411	100	27.210	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.07	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		42,4	90	100	1.497	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.02.02.201.09	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				100	1.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.10	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		84,8	155	100	14.924	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.12	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		99,2	2.283	100	2.964	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.13	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		95,9	4.813	100	4.775	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.14	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		94,1	10.283	100	15.500	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1.02.02.201.15	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan		100,0	82	100	662	Bidang Sumber Daya Kesehatan

		Regional/Regional Maintainance Center						
Pengadaan Obat, Vaksin	1.02.02.201.16	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		61,0	2.077	100	10.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.02.02.201.17	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		85,0	2.065	100	12.923	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.18	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan		88,1	151	100	444	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.19	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan		93,1	70		370	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.21	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		96,6	217	100	528	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.02.02.202.01	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		84,5	946	100	820	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.02.02.202.02	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		97,1	5.232	100	840	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.02.02.202.03	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		78,3	406	100	820	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.02.02.202.04	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		84,2	734	100	790	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.02.02.202.05	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		80,5	175	100	803	Bidang Kesehatan Masyarakat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.02.02.202.07	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		88,1	539	100	760	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.02.02.202.10	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100	750	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.02.02.202.11	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		83,7	222	100	750	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.02.02.202.12	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		82,5	559	100	810	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.02.02.202.13	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		77,5	26.072	100	300	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.202.15	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		91,9	2.541	100	1.409	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.202.16	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		83,7	280	100	650	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.202.17	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		86,7	832	100	2.312	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.202.18	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		85,3	1.213	100	1.320	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1.02.02.202.06	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100	750	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1.02.02.202.19	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		92,1	95	100	423	Bidang Pelayanan Kesehatan

Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.202.20	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		73,9	67	100	395	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.02.02.202.21	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		58,9	45	100	750	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.02.02.202.22	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		91,2	565	100	850	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.02.02.202.23	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		79,5	82	100	350	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1.02.02.202.24	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		4,5	9	100	113	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.202.25	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		82,8	2.930	100	1.700	Bidang Pelayanan Kesehatan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.02.202.26	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		99,2	29.090	100	33.546	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.02.02.202.28	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				100	294	Bidang Kesehatan Masyarakat
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.02.02.202.29	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		75,1	139	100	433	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	1.02.02.202.31	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan		88,2	149	100	724	Bidang Kesehatan Masyarakat
Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.202.33	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		78,5	2.573	100	805	Bidang Kesehatan Masyarakat
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.202.34	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		93,5	294	100	563	Bidang Kesehatan Masyarakat
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.02.02.202.35	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		8,5	220	100	1.790	Bidang Pelayanan Kesehatan

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.02.02.202.36	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				100	277	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.02.02.202.37	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		90,4	2.480	100	600	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.02.02.202.38	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				100	1.300	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1.02.02.203.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		83,6	139	100	800	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.02.02.203.02	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		71,3	639	100	851	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1.02.02.203.03	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan		88,0	914	100	2.839	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.204.02	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		81,0	410	100	15	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.02.02.2.04.03	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		81,2	77	100	310	Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.02.02.2.04.04	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		72,4	116	100	462	Bidang Sumber Daya Kesehatan

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN		PERSENTASE OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN						
Penyusunan Program Kerja	1.01.02.01.07.001	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun						Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	1.01.02.01.15.001	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Jarinagannya	1.828					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.01.02.01.15.005	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian	291					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK dan Pendamping DAK)	1.01.02.01.15	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Jarinagannya	7.078					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Produksi Distribusi Kefarmasian	1.01.02.01.15.011	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sarana Produksi Distribusi Kefarmasian	137					Bidang Sumber Daya Kesehatan
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		CAKUPAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	1.01.02.01.16.002	Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Penggunaan NAPZA	274					Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Revitalisasi Sistem Kesehatan	1.01.02.01.16.006	Jumlah Puskesmas BLUD dan Pemantapannya	838					Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.01.02.01.16.009	Jumlah Puskesmas yang dibentuk tim pembina UKS Kabupaten						Bidang Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jampersal	1.01.02.01.16.010	Jumlah peserta jamkesmas dan jampersal yang mendapatkan Pelayanan						Bidang Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	1.01.02.01.16.012	Persentase Peningkatan Cakupan BBL yang mendapat IMD	430					Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	1.01.02.01.16	Persentase Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	18.105					Bidang Pelayanan Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Gudang Farmasi	1.01.02.01.16	Persentase Pembiayaan operasional gudang farmasi bersumber dari dana pusat	349					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengelolaan dan Pemeliharaan Gudang Farmasi	1.01.02.01.16.018	Jumlah Gudang Farmasi yang dikelola dan dipelihara						Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Penyediaan Biaya Operasional dan pemeliharaan Laboratorium	1.01.02.01.16.019	Jumlah Laboratorium yang dikelola dan dipelihara	297					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar	1.01.02.01.16.022	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pembinaan Terhadap Petugas Puskesmas	661					Bidang Kesehatan Masyarakat
Bantuan Operasional Kesehatan (Dana Alokasi Khusus)	1.01.02.01.16.053	Persentase penyelesaian biaya operasional kesehatan di wilayah Kab.Inhil	17.085					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Jaminan Persalinan (Dana Alokasi Khusus)	1.01.02.01.16.054	Cakupan Persalinan yang ditolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten	4.706					Bidang Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Tradisional	1.01.02.01.16.055	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional	165					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak Menular	1.01.02.01.16.056	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat	388					Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.01.02.01.16.057	Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas	411					Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Gudang Farmasi (DAK)	1.01.02.01.16.058	Persentase Pembiayaan operasional gudang farmasi bersumber dari dana pusat	547					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sungai Iliran	1.01.02.01.16.059	Persentase Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional						Bidang Pelayanan Kesehatan
Revitalisasi Sistem Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.16	Jumlah Puskesmas BLUD dan Pemantapannya						Bidang Pelayanan Kesehatan
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak Menular (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.02.1.02.01.16.	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat, diabetes dan hipertensi						Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.02.1.02.01.16.	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas						Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (DAK)	1.02.1.02.01.19.	Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup						Bidang Kesehatan Masyarakat

Pendidikan dan Pelatihan Formal (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.05.	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal						Bidang Sumber Daya Kesehatan
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.28.	Persentase Pembinaan Puskesmas Mampu PONED						Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.32.	Persentase Pelayanan Kesehatan Program KIA						Bidang Kesehatan Masyarakat
Peningkatan, Pengembangan Sanitasi Dasar dan Air Minum (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.21	Persentase pelaksanaan pengawasan sanitasi dasar dan air minum						Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan (DAK)	1.01.02.01.17	Persentase Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan						Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Sadar Hidup Sehat (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.19	Persentase peserta yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat Sadar Hidup Sehat						Bidang Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jampersal (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.16	Persentase peserta jamkesmas dan jampersal yang mendapatkan Pelayanan						Bidang Pelayanan Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Kota (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.02.1.02.01.16.5 3.	Persentase Tertanggungnya Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Wilayah Kab.Inhil						Bidang Pelayanan Kesehatan
<b>PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>		<b>JUMLAH PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>						
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	1.01.02.01.17.001	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	111					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	1.01.02.01.17.002	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya	198					Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (DAK)	1.02.04.201.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</b>		<b>PERSENTASE PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</b>						
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	1.01.02.01.18.002	Jumlah kegiatan dalam upaya pencapaian keluarga sadar gizi						Bidang Kesehatan Masyarakat
<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<b>JUMLAH PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>						
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	1.01.02.01.19.001	Jumlah pelaksanaan Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	945					Bidang Kesehatan Masyarakat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	1.01.02.01.19.002	Jumlah pelaksanaan penyuluhan Pola Hidup Sehat	294					Bidang Kesehatan Masyarakat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.01.02.01.19.004	Jumlah Puskesmas dengan kemampuan/kesadaran, disiplin dan kinerja tenaga kesehatana di UPT Puskesmas se-Kab. Inhil yang ditingkatkan	118					Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Sadar Hidup Sehat	1.01.02.01.19.005	Jumlah peserta yang mengikuti pemberdayaan untuk Peningkatan peran serta masyarakat demi terwujudnya kesehatan	258					Bidang Kesehatan Masyarakat
<b>PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>		<b>JUMLAH PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>						
Pemenuhan SDM Kesehatan	1.01.02.01.20.001	Persentase rasio ketersediaan tenaga kesehatan						Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pendayagunaan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan Daerah Khusus	1.01.02.01.20.003	Persentase pemenuhan dokter kesehatan untuk Layanan Paripurna						Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>		<b>PERSENTASE PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>						
Peningkatan Pengawasan Sarana TTU/TPM, Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.01.02.01.21.005	Persentase pengawasan terhadap sarana TTU/TPM dan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	239					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan, Pengembangan Sanitasi Dasar dan Air Minum	1.01.02.01.21.006	Persentase pelaksanaan pengawasan sanitasi dasar dan air minum	350					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengelolaan, Pengawasan Limbah dan Sampah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.01.02.01.21.007	Persentase pelaksanaan pengawasan limbah dan sampah fasyankes	115					Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</b>		<b>CAKUPAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</b>						
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	1.01.02.01.22.001	Jumlah Fogging Fokus DBD - Workshop Fogging - Bimbingan Teknis Fogging - Konsultasi Fogging yang dilaksanakan	317					Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	1.01.02.01.22.004	Persentase pelaksanaan BIAS di kabupaten indragiri hilir	138					Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.01.02.01.22.005	Jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya Penanggulangan Terhadap Penularan Penyakit Menular Langsung dan Tidak Langsung	473					Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Peningkatan Imunisasi	1.01.02.01.22.008	Jumlah pelaksanaan penunjang program imunisasi	802					Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Wabah Virus	1.02.1.02.01.22.06	Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Wabah Virus						Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah	1.01.02.01.22.009	Jumlah Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Menular Yang Berpotensi	746					Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

		KLB/Wabah yang dilaksanakan						
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS	1.01.02.01.22.012	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	232					Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penanggulangan dan Pemberantasan Filariasis	1.01.02.01.22.014	Persentase pelaksanaan kegiatan Transmission Assessment Urvey/TAS	487					Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru	1.01.02.01.22.016	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	330					Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sistem Registrasi Sample (SRS)	1.01.02.01.22.017	Jumlah prevalensi dan distribusi kejadian kematian yang disebabkan penyakit dan kecelakaan	37					Bidang Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji	1.01.02.01.22.019	Jumlah Jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan						Bidang Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Cakupan Tatalaksana dan Kualitas Program Pengendalian Malaria	1.01.02.01.22.020	Persentase Penderita Malaria diobati sesuai standar 100% dan mampu mempertahankan status eliminasi malaria						Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.22.21	Jumlah Jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan						Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Peningkatan Imunisasi (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.22.22	Jumlah pelaksanaan penunjang program imunisasi						Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan penanggulangan wabah (DAK)	1.01.02.01.22.23	Jumlah Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Menular Yang Berpotensi KLB/Wabah yang dilaksanakan						Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.22.24	Persentase pelaksanaan BIAS di kabupaten indragiri hilir						Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>		<b>CAKUPAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>						

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	1.01.02.01.23.003	Jumlah Sosialisasi/pelatihan data informasi perizinan dibidang kesehatan bagi tenaga puskesmas yang dilaksanakan	366					Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Penetapan Standar Akreditasi dan Perizinan Sarana dan Prasarana Kesehatan	1.01.02.01.23.009	Persentase Pemutakhiran Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga	121					Bidang Pelayanan Kesehatan
Rapat Kerja Kesehatan Kabupaten	1.01.02.01.23.010	Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan	183					
Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	1.01.02.01.23.011	Persentase Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang mengimplementasikan Sistem Informasi Kesehatan	6.613					Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Penyusunan Standar Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.23.012	Persentase puskesmas yang menerapkan Standar Pelayanan Kesehatan Primer	1.926					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi	1.01.02.01.23.013	Persentase puskesmas yang dinilai berprestasi						Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pengembangan Jaringan Komunikasi Data	1.01.02.01.23.014	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan kualitas Akses Jaringannya						Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA</b>		<b>JUMLAH PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA</b>						
Pembangunan Puskesmas	1.02.02.201.02	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	-					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Puskesmas Pembantu	1.01.02.01.25.002	Persentase puskesmas yang dibangun dan direlokasi	1.784					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Puskesmas Keliling	1.01.02.01.25.006	Jumlah pusling yang disediakan	2.294					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Puskesmas Keliling (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.25.004	Jumlah pusling yang disediakan ( DAK)						Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	1.01.02.01.25.007	Persentase sarana dan prasarana Puskesmas yang disediakan	2.304					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	1.01.02.01.25.007	Persentase sarpras Puskesmas Pembantu yang disediakan	934					Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	1.01.02.01.25.014	Sarana Prasarana Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan						Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	1.01.02.01.25.015	Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu yang dilakukan pemeliharaan						Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	1.01.02.01.25.021	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi	967					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	1.01.02.01.25.024	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi						Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK)	1.01.02.01.25.	Jumlah puskesmas yang dibangun	3.273					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.25.	Persentase Rehabilitasi Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK)	-					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	1.01.02.01.25.035	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	1.685					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan	1.01.02.01.25.036	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	-					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Dasar Bidang Kesehatan	1.01.02.01.25.	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Dasar Bidang Kesehatan						Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penunjang Dasar Bidang Kesehatan	1.01.02.01.25.037	Persentase penunjang pembangunan dan peningkatan sarkes						Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penunjang Dasar Bidang Kesehatan (DAK)	1.01.02.01.25.	Persentase Penunjang Dasar Bidang Kesehatan (DAK)						Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.25.	Persentase sarana dan prasarana Puskesmas yang disediakan						Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penyediaan Dasar Bidang Kesehatan	1.01.02.01.25.	Persentase Penyediaan Dasar Bidang Kesehatan	189					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penyediaan Dasar Bidang Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.02.01.25.	Persentase Penyediaan Dasar Bidang Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	2.033					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)	1.01.02.01.25.	Sarana Prasarana Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan						Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pembangunan Rumah Dinas (DAK)	1.01.02.01.25.	Jumlah Rumah Dinas Yang Dibangun						Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pembangunan Puskesmas (Dana Insentif Daerah/DID)	1.01.02.01.25.	Jumlah puskesmas yang dibangun						Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (Dana Insentif Daerah/DID)	1.01.02.01.25.	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi						Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>		<b>PERSENTASE KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>						
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	1.01.02.01.28.005	Persentase Pembinaan Puskesmas Mampu PONED	261					Bidang Sumber Daya Kesehatan
Kemitraan dan Pembinaan Organisasi Profesi Kesehatan	1.01.02.01.28.009	Persentase Organisasi Profesi kesehatan yang bermitra dan dibina	64					Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA</b>		<b>PERSENTASE PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA</b>						
Pembinaan, Pemantauan dan Pelayanan Usia Lanjut	1.01.02.01.30.008	Persentase dari evaluasi program lansia	73					Bidang Kesehatan Masyarakat
<b>PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK</b>		<b>PERSENTASE PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK</b>						
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.01.02.01.32.004	Persentase Pelayanan Kesehatan Program KIA	517					Bidang Kesehatan Masyarakat
<b>PROGRAM MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN</b>		<b>CAKUPAN MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN</b>						
Penyusunan Profil Daerah	1.01.02.01.46.001	Jumlah dokumen profil kesehatan yang dirangkum dari data-data dinkes & Pkm	146					Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan

Koordinasi, Sosialisasi, Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	1.01.02.01.46.002	Jumlah Dokumen Perencanaan APBD Kabupaten						Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	1.01.02.01.46.003	Persentase terbentuknya sistem pengelolaan dan penyimpanan data terpadu						Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Pengembangan jaringan komunikasi data	1.01.02.01.23.014	Persentase Puskesmas yang ditingkatkan kualitas Akses Jaringannya						Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan
Kegiatan . . .		.....						
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>JUMLAH PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>						
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	1.01.02.01.06.006	Jumlah Aset Milik Daerah yang ditata	219					Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator).

Tabel 7.1 Indikator kinerja Perangkat Daerah

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA
			Realisasi			Target		
			2019	2020	2021*	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Umur Harapan Hidup		67,09	68	68,4	68,8	70	
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan		75%	79%	83%	100%	100%	
	Akreditasi FKTP dan RS		75%	85%	95%	100%	100%	
	Indeks Kepuasan Masyarakat		90%	97%	98%	100%	100%	
	Indeks Repormasi Birokrasi Dinas Kesehatan			65	68	70	75	
	Nilai Evaluasi RB Dinas Kesehatan atas komponen pengungkit			17.80	18.91	20	20	
	Nilai AKIP Dinas Kesehatan		CC	CC	B	BB	BB	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pembangunan di bidang kesehatan. Selanjutnya Rencana Strategis merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi (Kebijakan, Program, Kegiatan) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Strategis RENSTRA, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir berkewajiban untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pemantauan terhadap penjabaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan ke dalam Rencana Kerja Tahunan.
3. Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
4. Dinas Kesehatan, UPTD, masyarakat, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya secara sungguh-sungguh melaksanakan program - program dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023.

Tembilahan, 04 April 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



**dr. H. AFRIZAL D,MM**  
NIP. 19730402 200501 1005